



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/175 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2025 DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan data statistik guna penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, telah dilaksanakan tahap perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 melalui E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan keterisian data dan tata kelola penyelenggaraan Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan penyebaran Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 Hal Implementasi SIPD;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 Hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI); dan

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/4924/Bangda tanggal 10 Juli 2024 Hal Progres Pengisian Modul E-Walidata dan RPJPD 2025-2045 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/175 TAHUN 2026
TENTANG
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL
DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025 DALAM E-WALIDATA SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	1.01.000019	Buku	Buah	0
2	1.01.000026	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang dibutuhkan	Buah	0
3	1.01.000027	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang tersedia	Buah	0
4	1.01.000029	Dayah yang meningkat kualitas dan pengembangan kelembagaannya	Satuan Pendidikan	0
5	1.01.000038	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	5
6	1.01.000039	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0
7	1.01.000044	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1
8	1.01.000045	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	0
9	1.01.000046	Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen	0
10	1.01.000073	Kitab/Buku Pendidikan Dayah tersedia	Buku	0
11	1.01.000076	Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Khusus	Dokumen	0
12	1.01.000077	Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Menengah	Dokumen	0
13	1.01.000088	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Dokumen	0
14	1.01.000091	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	25630
15	1.01.000104	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang didistribusikan	Orang	73815
16	1.01.000118	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	27565
17	1.01.000121	Pendidikan khusus yang mengelola Dana BOS	Satuan	188
18	1.01.000134	Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang berpotensi putus sekolah	Peserta Didik	0
19	1.01.000135	Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	104404
20	1.01.000207	Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	75849
21	1.01.000214	Ruang keterampilan	Ruang	5866
22	1.01.000217	Ruang konseling	Ruang	3117
23	1.01.000219	Ruang laboratorium bahasa yang layak	Ruang	9384
24	1.01.000220	Ruang laboratorium bahasa yang rusak sedang/berat	Ruang	2247
25	1.01.000221	Ruang laboratorium IPA yang layak	Ruang	4049
26	1.01.000222	Ruang laboratorium IPA yang rusak sedang/berat	Ruang	2247
27	1.01.000223	Ruang laboratorium komputer yang layak	Ruang	9384

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
28	1.01.000224	Ruang laboratorium komputer yang rusak sedang/berat	Ruang	2247
29	1.01.000225	Ruang laboratorium yang layak	Ruang	15249
30	1.01.000227	Ruang laboratorium bahasa	Ruang	1989
31	1.01.000228	Ruang laboratorium bahasa yang perlu direhabilitasi	Ruang	339
32	1.01.000229	Ruang laboratorium bahasa yang telah direhabilitasi	Ruang	0
33	1.01.000230	Ruang laboratorium biologi	Ruang	1014
34	1.01.000231	Ruang laboratorium biologi yang layak	Ruang	667
35	1.01.000232	Ruang laboratorium biologi yang perlu direhabilitasi	Ruang	204
36	1.01.000233	Ruang laboratorium biologi yang rusak sedang/berat	Ruang	204
37	1.01.000234	Ruang laboratorium biologi yang telah direhabilitasi	Ruang	0
38	1.01.000235	Ruang laboratorium fisika	Ruang	1044
39	1.01.000236	Ruang laboratorium fisika yang perlu direhabilitasi	Ruang	187
40	1.01.000237	Ruang laboratorium fisika yang telah direhabilitasi	Ruang	0
41	1.01.000239	Ruang laboratorium fisika yang layak	Ruang	720
42	1.01.000240	Ruang laboratorium fisika yang rusak sedang/berat	Ruang	720
43	1.01.000242	Ruang laboratorium IPA yang perlu direhabilitasi	Ruang	1608
44	1.01.000243	Ruang laboratorium IPA yang telah direhabilitasi	Ruang	0
45	1.01.000244	Ruang laboratorium kimia	Ruang	1032
46	1.01.000245	Ruang laboratorium kimia yang layak	Ruang	683
47	1.01.000246	Ruang laboratorium kimia yang perlu direhabilitasi	Ruang	164
48	1.01.000247	Ruang laboratorium kimia yang rusak sedang/berat	Ruang	164
49	1.01.000248	Ruang laboratorium kimia yang telah direhabilitasi	Ruang	0
50	1.01.000249	Ruang laboratorium komputer	Ruang	13952
51	1.01.000250	Ruang laboratorium komputer yang perlu direhabilitasi	Ruang	2247
52	1.01.000251	Ruang laboratorium komputer yang telah direhabilitasi	Ruang	0
53	1.01.000253	Ruang Laboratorium yang perlu direhabilitasi	Ruang	4959
54	1.01.000254	Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi	Ruang	0
55	1.01.000256	Ruang organisasi kesiswaan	Ruang	0
56	1.01.000274	Ruang Praktik yang layak	Ruang	366
57	1.01.000275	Ruang Praktik yang rusak sedang/berat	Ruang	101
58	1.01.000276	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang perlu direhabilitasi	Unit	0
59	1.01.000277	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang telah direhabilitasi	Unit	0
60	1.01.000287	Ruang tata usaha	Ruang	9614
61	1.01.000290	Ruang TU yang layak	Ruang	6712
62	1.01.000377	Satuan pendidikan yang belum memiliki Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	37
63	1.01.000381	Satuan pendidikan yang membutuhkan Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	41
64	1.01.000382	Satuan pendidikan yang membutuhkan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0
65	1.01.000385	Satuan pendidikan yang memiliki Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan	4
66	1.01.000397	Satuan pendidikan yang sudah memiliki Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0
67	1.01.000406	Sekolah Menengah Atas yang mengelola Dana BOS	Satuan	901
68	1.01.000407	Sekolah Menengah Kejuruan yang mengelola Dana BOS	Satuan	1560
69	1.01.000416	Sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	Satuan	0
70	1.01.000419	Silabus Muatan Lokal Pendidikan khusus	Dokumen	4
71	1.01.000420	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Dokumen	2169
72	1.01.000435	Tempat beribadah	Ruang	20845
73	1.01.000436	Tempat bermain/berolahraga	Unit	7625
74	1.01.000437	Tempat ibadah dayah yang telah direhabilitasi	Unit	0
75	1.01.000442	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang telah lulus sertifikasi	Orang	1922

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
76	1.01.000454	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	7175
77	1.01.000455	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	1592
78	1.01.000471	Unit pendidikan khusus	Unit	187
79	1.01.000472	Unit pendidikan khusus yang layak	Kasus	188
80	1.01.000473	Unit pendidikan khusus yang rusak sedang/berat	Unit	0
81	1.01.000477	Unit SMK	Unit	1560
82	1.01.000478	Unit SMK yang layak	Unit	1560
83	1.01.000479	Unit SMK yang rusak sedang/berat	Unit	0
84	1.01.000482	Usulan pendirian sekolah pendidikan khusus baru	Dokumen	2
85	1.01.000589	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total	Unit	14839
86	1.01.000689	Jumlah Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	373
87	1.01.000690	Jumlah Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	528
88	1.01.000691	Jumlah Sekolah Menengah Atas	Unit	901
89	1.01.000692	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	350848
90	1.01.000693	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	116483
91	1.01.000694	Jjumlah Siswa Sekolah Menengah Atas	Orang	467331
92	1.01.000695	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	135403
93	1.01.000696	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	55532
94	1.01.000697	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	190935
95	1.01.000698	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	215448
96	1.01.000699	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	60955
97	1.01.000700	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	276403
98	1.01.000701	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 negeri	Orang	118895
99	1.01.000702	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 swasta	Orang	39909
100	1.01.000703	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1	Orang	158804
101	1.01.000704	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 negeri	Orang	116546
102	1.01.000705	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 swasta	Orang	39863
103	1.01.000706	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2	Orang	156409
104	1.01.000707	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 negeri	Orang	115423
105	1.01.000708	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 swasta	Orang	36750
106	1.01.000709	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3	Orang	152173
107	1.01.000710	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	350848
108	1.01.000711	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	116483
109	1.01.000712	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat	Orang	467331
110	1.01.000713	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	350848
111	1.01.000714	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	116483
112	1.01.000716	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	350848
113	1.01.000717	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	116483
114	1.01.000725	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun negeri	Orang	350843
115	1.01.000726	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun swasta	Orang	116479
116	1.01.000727	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun	Orang	467322
117	1.01.000728	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang negeri	Orang	12
118	1.01.000729	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang swasta	Orang	117
119	1.01.000730	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang	Orang	129
120	1.01.000731	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeri	Orang	665
121	1.01.000732	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swasta	Orang	556
122	1.01.000733	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus	Orang	1221
123	1.01.000734	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeri	Orang	18988
124	1.01.000735	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru swasta	Orang	9087
125	1.01.000736	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru	Orang	28075
126	1.01.000737	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki	Orang	8220
127	1.01.000738	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki	Orang	3814

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
128	1.01.000739	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki	Orang	12034
129	1.01.000740	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeri	Orang	10768
130	1.01.000741	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swasta	Orang	5273
131	1.01.000742	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan	Orang	16041
132	1.01.000743	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	59
133	1.01.000744	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	334
134	1.01.000745	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1	Orang	393
135	1.01.000746	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	18578
136	1.01.000747	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	8222
137	1.01.000748	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas	Orang	26800
138	1.01.000749	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	3544
139	1.01.000750	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	1673
140	1.01.000751	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	5217
141	1.01.000752	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	1736
142	1.01.000753	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	1067
143	1.01.000754	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	2803
144	1.01.000755	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA negeri	Orang	828
145	1.01.000756	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA swasta	Orang	341
146	1.01.000757	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA	Orang	1169
147	1.01.000758	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA negeri	Orang	1895
148	1.01.000759	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA swasta	Orang	1049
149	1.01.000760	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA	Orang	2944
150	1.01.000761	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	9953
151	1.01.000762	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	3914
152	1.01.000763	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas	Orang	13867
153	1.01.000764	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	9467
154	1.01.000765	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	3878
155	1.01.000766	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas	Unit	13345
156	1.01.000767	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik negeri	Unit	5660
157	1.01.000768	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik swasta	Unit	3275
158	1.01.000769	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik	Unit	8935
159	1.01.000770	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan negeri	Unit	2021
160	1.01.000771	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan swasta	Unit	950
161	1.01.000772	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan	Unit	2971

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
162	1.01.000773	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang negeri	Unit	1467
163	1.01.000774	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang swasta	Unit	470
164	1.01.000775	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang	Unit	1937
165	1.01.000776	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat	Unit	845
166	1.01.000777	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat	Unit	330
167	1.01.000778	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat	Unit	1175
168	1.01.000779	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total	Unit	0
169	1.01.000780	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total	Unit	0
170	1.01.000781	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total	Unit	0
171	1.01.000782	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 negeri	Orang	1248
172	1.01.000783	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 swasta	Orang	784
173	1.01.000784	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1	Orang	2032
174	1.01.000785	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	239
175	1.01.000786	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	1321
176	1.01.000787	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	1560
177	1.01.000788	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	305794
178	1.01.000790	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	837319
179	1.01.000791	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	135207
180	1.01.000792	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	340618
181	1.01.000793	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	475825
182	1.01.000794	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	170588
183	1.01.000795	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	190948
184	1.01.000796	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	361536
185	1.01.000797	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 negeri	Orang	103830
186	1.01.000798	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 swasta	Orang	190113
187	1.01.000800	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 negeri	Orang	101172
188	1.01.000801	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 swasta	Orang	179002
189	1.01.000803	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 negeri	Orang	99778
190	1.01.000804	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 swasta	Orang	162439
191	1.01.000806	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 negeri	Orang	1017
192	1.01.000807	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 swasta	Orang	150
193	1.01.000809	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri	Orang	305794
194	1.01.000810	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta	Orang	531525
195	1.01.000812	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri	Orang	837319
196	1.01.000813	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta	Orang	531525
197	1.01.000814	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat	Orang	837319
198	1.01.000821	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun negeri	Orang	305792
199	1.01.000822	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun swasta	Orang	531512
200	1.01.000823	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun	Orang	837304

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
201	1.01.000824	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang negeri	Orang	47
202	1.01.000825	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang swasta	Orang	1111
203	1.01.000826	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang	Orang	1158
204	1.01.000827	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeri	Orang	617
205	1.01.000828	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swasta	Orang	4005
206	1.01.000829	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus	Orang	4622
207	1.01.000830	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeri	Orang	17396
208	1.01.000831	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swasta	Orang	32551
209	1.01.000832	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru	Orang	49947
210	1.01.000833	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeri	Orang	8613
211	1.01.000834	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swasta	Orang	16500
212	1.01.000835	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki	Orang	25113
213	1.01.000836	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan negeri	Orang	8783
214	1.01.000837	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan swasta	Orang	16051
215	1.01.000838	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan	Orang	24834
216	1.01.000839	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	129
217	1.01.000840	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	1499
218	1.01.000841	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1	Orang	1628
219	1.01.000842	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	16851
220	1.01.000843	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	29416
221	1.01.000844	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas	Orang	46267
222	1.01.000845	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	2877
223	1.01.000846	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	6275
224	1.01.000847	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	9152
225	1.01.000848	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	1278
226	1.01.000849	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	3569
227	1.01.000850	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	4847
228	1.01.000851	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA negeri	Orang	816
229	1.01.000852	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA swasta	Orang	2090
230	1.01.000853	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA	Orang	2906
231	1.01.000854	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA negeri	Orang	3241
232	1.01.000855	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA swasta	Orang	1115

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
233	1.01.000856	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA	Orang	4356
234	1.01.000857	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	8803
235	1.01.000858	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Orang	19153
236	1.01.000859	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	27956
237	1.01.000860	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	7739
238	1.01.000861	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	22565
239	1.01.000862	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	30304
240	1.01.000863	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri	Unit	4305
241	1.01.000864	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta	Unit	11251
242	1.01.000865	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik	Unit	15556
243	1.01.000866	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan negeri	Unit	1521
244	1.01.000867	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan swasta	Unit	5142
245	1.01.000868	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan	Unit	6663
246	1.01.000869	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang negeri	Unit	580
247	1.01.000870	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang swasta	Unit	1729
248	1.01.000871	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang	Unit	2309
249	1.01.000872	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat negeri	Unit	333
250	1.01.000873	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat swasta	Unit	837
251	1.01.000874	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat	Unit	1170
252	1.01.000875	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total negeri	Unit	0
253	1.01.000876	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total swasta	Unit	0
254	1.01.000877	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total	Unit	0
255	1.01.000878	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 negeri	Orang	1115
256	1.01.000879	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 swasta	Orang	2199
257	1.01.000880	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1	Orang	3314
258	1.01.000885	Profesi pelaku perbukuan daerah	Orang	0
259	1.01.000888	Infrastruktur TIK	Paket	0
260	1.01.000889	Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2625

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	1.02.000001	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	80
2	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	3
3	1.02.000007	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes eksisting	Unit	14
4	1.02.000015	Barang penunjang operasional RS	Unit	0
5	1.02.000019	Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Sarana	83
6	1.02.000020	Data laporan kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kuantitas	0
7	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	3218
8	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	468
9	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	388
10	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	337
11	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Orang	155
12	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	499
13	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	194
14	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	216
15	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Orang	299
16	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Orang	135
17	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	579
18	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	257
19	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Orang	211
20	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Orang	78
21	1.02.000036	Dokter Umum	Orang	12158
22	1.02.000040	Dokumen distribusi alkes, obat. Vaksin, makanan, minuman serta faskes lainnya	Dokumen	2
23	1.02.000046	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Dokumen	6
24	1.02.000048	Dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	0
25	1.02.000050	Dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	20
26	1.02.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3
27	1.02.000055	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	4
28	1.02.000056	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	4
29	1.02.000057	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4
30	1.02.000058	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	2
31	1.02.000060	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	2
32	1.02.000061	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	22
33	1.02.000062	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12
34	1.02.000065	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4
35	1.02.000072	Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	0
36	1.02.000074	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	0
37	1.02.000076	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	0
38	1.02.000080	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	11522
39	1.02.000083	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	0
40	1.02.000084	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	752

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
41	1.02.000085	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Unit	11522
42	1.02.000086	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	250
43	1.02.000088	Faskes lainnya	Unit	7629
44	1.02.000090	Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Unit	2
45	1.02.000098	HCU	Unit	783
46	1.02.000099	Ibu bersalin	Orang	387052
47	1.02.000100	Ibu Hamil	Orang	407484
48	1.02.000101	ICCU/ICVCU	Unit	201
49	1.02.000102	ICU	Unit	2449
50	1.02.000105	Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kuantitas	4
51	1.02.000113	NICU	Unit	930
52	1.02.000115	obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	Paket	48
53	1.02.000117	Orang kecanduan NAPZA	Orang	0
54	1.02.000140	Pengolahan Limbah	Unit	8
55	1.02.000142	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kualtitas	12
56	1.02.000143	Peralatan di laundry	Unit	8
57	1.02.000144	Peralatan di ruang CSSD	Unit	8
58	1.02.000145	Peralatan di ruang dapur/gizi	Unit	8
59	1.02.000146	Peralatan di ruang farmasi	Unit	8
60	1.02.000147	Peralatan di ruang gawat darurat	Unit	8
61	1.02.000148	Peralatan di ruang intensif	Unit	8
62	1.02.000149	Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	Unit	8
63	1.02.000150	Peralatan di ruang Laboratorium	Unit	8
64	1.02.000151	Peralatan di ruang operasi	Unit	8
65	1.02.000152	Peralatan di ruang radiologi	Unit	8
66	1.02.000153	Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	Unit	8
67	1.02.000154	Peralatan di ruang rekam medik	Unit	8
68	1.02.000155	Peralatan penanggulangan kebakaran	Unit	8
69	1.02.000156	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	Unit	8
70	1.02.000158	PICU	Unit	639
71	1.02.000162	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	35
72	1.02.000164	Puskesmas	Unit	883
73	1.02.000165	RICU	Unit	0
74	1.02.000167	Ruang Administrasi dan Manajemen	Unit	8
75	1.02.000169	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Unit	8
76	1.02.000172	Ruang Farmasi	Unit	8
77	1.02.000173	Ruang Gawat Darurat	Unit	8
78	1.02.000174	Ruang Gizi	Unit	8
79	1.02.000176	Ruang Jenazah	Unit	8
80	1.02.000183	Ruang Laboratorium	Unit	8
81	1.02.000184	Ruang Loundry	Unit	8
82	1.02.000185	Ruang Operasi	Unit	8
83	1.02.000186	Ruang Parkir	Unit	8
84	1.02.000187	Ruang Pemeliharaan Sarpras	Unit	8
85	1.02.000190	Ruang Penaggulangan Kebakaran	Unit	8
86	1.02.000192	Ruang Pengelolaan Gas Medik	Unit	8
87	1.02.000193	Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	Unit	8
88	1.02.000196	Ruang Radiologi	Unit	8
89	1.02.000198	Ruang Rawat Inap	Unit	8
90	1.02.000199	Ruang Rawat Intentif:	Unit	8
91	1.02.000200	Ruang Rawat Jalan	Unit	8
92	1.02.000202	Ruang Rehabilitasi Medik	Unit	8
93	1.02.000203	Ruang Rekam Medis	Unit	8

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
94	1.02.000204	Ruang Sterilisasi	Unit	8
95	1.02.000208	Rumah Sakit	Unit	369
96	1.02.000209	Rumah Sakit kelas B	Unit	36
97	1.02.000210	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	Unit	36
98	1.02.000211	Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	0
99	1.02.000212	Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	0
100	1.02.000213	Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	0
101	1.02.000227	Telemedicine	Unit	2
102	1.02.000228	Tempat tidur rumah sakit	Unit	47926
103	1.02.000229	Tenaga Apotek	Orang	20645
104	1.02.000230	Tenaga gizi	Orang	2853
105	1.02.000231	Tenaga Kebidanan	Orang	29937
106	1.02.000232	Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	29937
107	1.02.000233	Tenaga Keperawatan	Orang	65327
108	1.02.000234	Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	65327
109	1.02.000235	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	521
110	1.02.000236	Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	521
111	1.02.000237	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	1961
112	1.02.000238	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	3918
113	1.02.000239	Tenaga Kesehatan tradisional	Orang	34
114	1.02.000240	Tenaga Keteknisan Medis	Orang	8238
115	1.02.000241	Tenaga keterampilan fisik	Orang	2755
116	1.02.000242	Tenaga Teknik Biomedika	Orang	9861
117	1.02.000258	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	117
118	1.02.000267	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	4735
119	1.02.000268	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	45735
120	1.02.000269	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	45735
121	1.02.000273	Pengolahan Limbah	Unit	8
122	1.02.000275	Alat Kesehatan	Unit	0
123	1.02.000305	Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	8
124	1.02.000318	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan	Keluarga	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	1.03.000022	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Bangunan Gedung	0
2	1.03.000034	Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi lain)	Dokumen	0
3	1.03.000039	Berita acara kesepakatan substansi antara gubernur dengan DPRD Provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi	Dokumen	0
4	1.03.000041	Berita Acara konsultasi publik I	Dokumen	0
5	1.03.000042	Berita Acara konsultasi publik II	Dokumen	0
6	1.03.000045	Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi	Dokumen	2
7	1.03.000046	Berita Acara rapat koordinasi/surat kesepkatan dengan Pemda Provinsi yang berbatasan	Dokumen	0
8	1.03.000056	Dokumen dan Validasi KLHS Provinsi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Dokumen	0
9	1.03.000066	Dokumen Evaluasi Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	1
10	1.03.000069	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dokumen	1
11	1.03.000070	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dokumen	1
12	1.03.000071	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dokumen	0
13	1.03.000074	Dokumen kebijakan PERDA/PERGUB selain RTRW Provinsi	Dokumen	0
14	1.03.000076	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Dokumen	0
15	1.03.000082	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Dokumen	0
16	1.03.000083	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	1
17	1.03.000085	Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	0
18	1.03.000087	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	8
19	1.03.000089	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	2
20	1.03.000106	Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	0
21	1.03.000107	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen	1
22	1.03.000129	Dokumen Pengelolaan Hidrologi WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	3
23	1.03.000131	Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	1
24	1.03.000133	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum	Dokumen	1
25	1.03.000135	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen	1
26	1.03.000142	Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	4
27	1.03.000144	Dokumen Ranperda (Raperda, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	0
28	1.03.000145	Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	0
29	1.03.000148	Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	11
30	1.03.000150	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
31	1.03.000154	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1
32	1.03.000157	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	0
33	1.03.000158	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	1
34	1.03.000159	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum	Dokumen	1
35	1.03.000162	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	Dokumen	1
36	1.03.000163	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	0
37	1.03.000164	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	1
38	1.03.000165	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	9
39	1.03.000166	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dokumen	3
40	1.03.000191	Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Unit	0
41	1.03.000192	Flyover	Flyover	0
42	1.03.000196	Jembatan	Jembatan	2056
43	1.03.000212	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	0
44	1.03.000224	Keterangan Kesesuaian Substansi	Dokumen	0
45	1.03.000229	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	0
46	1.03.000230	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Dokumen	2
47	1.03.000232	Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	1
48	1.03.000233	Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	708
49	1.03.000246	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	KM	0,73
50	1.03.000249	Panjang Jalan	KM	2440,12
51	1.03.000251	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	KM	2607,10
52	1.03.000257	Panjang Sungai	KM	1390,78
53	1.03.000258	Panjang Tanggul	KM	0
54	1.03.000261	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1
55	1.03.000273	Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Provinsi	Orang	0
56	1.03.000277	Penyempurnaan Ranperda RTRW Provinsi menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi	Dokumen	0
57	1.03.000282	Persetujuan Bersama dengan DPRD Provinsi atas Ranperda beserta lampirannya (Pasca Linsek)	Dokumen	0
58	1.03.000283	Persetujuan teknis Pengaturan Perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan	Dokumen	0
59	1.03.000284	Peta (SHP) untuk diunggah dalam bentuk link google drive	Dokumen	0
60	1.03.000295	Rapat Pelaksanaan Persetujuan Subatansi RTRW Provinsi	Dokumen	0
61	1.03.000297	Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi	Dokumen	0
62	1.03.000302	Rapat Persiapan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Dokumen	0
63	1.03.000305	Rekomendasi Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial	Dokumen	0
64	1.03.000308	Rumah Negara	Rumah	0
65	1.03.000343	Surat penyampaian Ranperda RTRW Provinsi yang telah disempurnakan dari Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri	Dokumen	0
66	1.03.000344	Surat Permohonan Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota dann surat permohonan fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota	Dokumen	4
67	1.03.000346	Surat Permohonan Evaluasi dari Gubernur	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
68	1.03.000348	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan	Dokumen	0
69	1.03.000349	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW Provinsi	Dokumen	0
70	1.03.000353	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh gubernur	Dokumen	0
71	1.03.000364	Underpass	Underpass	0
72	1.03.000389	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	0
73	1.03.000401	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar	0
74	1.03.000416	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Paket	0
75	1.03.000420	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	0
76	1.03.000431	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	1
77	1.03.000432	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	1
78	1.03.000434	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	0
79	1.03.000435	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi	Dokumen	0
80	1.03.000436	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	0
81	1.03.000437	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Dokumen	0
82	1.03.000438	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen	0
83	1.03.000442	Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional	Dokumen	1
84	1.03.000445	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	1
85	1.03.000446	Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah	Dokumen	1
86	1.03.000450	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	0
87	1.03.000451	Jumlah Dokumen Pembinaan	Dokumen	0
88	1.03.000453	Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	0
89	1.03.000454	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dokumen	1
90	1.03.000456	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	1
91	1.03.000458	Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	1
92	1.03.000459	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	1
93	1.03.000461	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	1
94	1.03.000469	Jumlah Dokumen Prosedur Operasi Standar Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	1
95	1.03.000471	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
96	1.03.000474	Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
97	1.03.000475	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1
98	1.03.000478	Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Dokumen	1
99	1.03.000479	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	0
100	1.03.000483	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1
101	1.03.000485	Jumlah dokumen roadmap sanitasi Provinsi	Dokumen	1
102	1.03.000487	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	1
103	1.03.000493	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	0
104	1.03.000496	Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	1
105	1.03.000500	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	35
106	1.03.000501	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kabupaten/ Kota	35
107	1.03.000505	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	1
108	1.03.000506	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan	1
109	1.03.000507	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Lembaga	0
110	1.03.000508	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA	Lembaga	1
111	1.03.000509	Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	0
112	1.03.000518	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Paket	0
113	1.03.000527	Jumlah Pengelola SIPJAKI	Orang	0
114	1.03.000529	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	0
115	1.03.000531	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Unit	0
116	1.03.000538	Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	1
117	1.03.000543	Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan	Unit	0
118	1.03.000560	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0
119	1.03.000561	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Unit	35
120	1.03.000568	Jumlah SPAM	Unit	5
121	1.03.000569	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	0
122	1.03.000575	Jumlah TPST	Unit	0
123	1.03.000579	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari	0
124	1.03.000602	Panjang Bangunan Pengaman Pantai	KM	0
125	1.03.000604	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi	KM	2440,12
126	1.03.000614	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1
127	1.03.000623	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	1
128	1.03.000639	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	8
129	1.03.000641	Jumlah Pembangunan Penampung Air	Unit	0
130	1.03.000643	Jumlah Rehabilitasi embung	Unit	2
131	1.03.000644	Jumlah Rehabilitasi Penampung Air Lainnya	Unit	0
132	1.03.000649	Panjang Pembangunan Tanggul Sungai	Km	0,74
133	1.03.000650	Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	Km	0
134	1.03.000651	Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Km	0
135	1.03.000654	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Unit	0
136	1.03.000662	Jumlah Rehabilitasi Check dam	Unit	0
137	1.03.000663	Jumlah Pembangunan Check Dam	Unit	0
138	1.03.000666	Panjang Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Km	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
139	1.03.000667	Panjang Peningkatan Tanggul Sungai	Km	0
140	1.03.000668	Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Km	0
141	1.03.000669	Jumlah Peningkatan Pintu Air	Unit	0
142	1.03.000676	Jumlah Peningkatan Check DAM	Unit	0
143	1.03.000679	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Unit	1
144	1.03.000683	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	5,8
145	1.03.000686	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Unit	77
146	1.03.000689	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya	Unit	17
147	1.03.000693	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul	Km	2
148	1.03.000694	Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai	Km	2
149	1.03.000709	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	0
150	1.03.000710	Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	0
151	1.03.000715	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	13,35
152	1.03.000716	Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	1
153	1.03.000721	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	2607,10
154	1.03.000722	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	145
155	1.03.000727	Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi	Lembaga	6
156	1.03.000728	Jumlah Alokasi Air di Daerah Irigasi	Liter/Detik	16365768
157	1.03.000729	Fasilitasi Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	1
158	1.03.000730	Fasilitasi Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah	Lembaga	708
159	1.03.000745	Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	1
160	1.03.000746	Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	1
161	1.03.000747	Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	1
162	1.03.000748	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	1
163	1.03.000749	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	0
164	1.03.000750	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Unit SPAM	0
165	1.03.910114	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Orang	1
166	1.03.910118	Jumlah perjanjian kerja sama SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0
167	1.03.910119	Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM	kabupaten/kota	1
168	1.03.910123	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD	Orang	0
169	1.03.910128	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Paket	0
170	1.03.910129	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
171	1.03.910130	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan	0
172	1.03.910131	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	0
173	1.03.910134	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen	0
174	1.03.910135	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus	0
175	1.03.910137	Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	1
176	1.03.910138	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1
177	1.03.910140	Layanan KKPR	Layanan	0
178	1.03.910141	Layanan Persetujuan KKPR	Layanan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
179	1.03.910142	Laporan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	13
180	1.03.910143	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1
181	1.03.910144	Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berita Acara	1
182	1.03.910145	Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	7
183	1.03.910146	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	2
184	1.03.910147	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	2
185	1.03.910148	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1
186	1.03.910151	Data SHP Peta Dasar	Peta	0
187	1.03.910152	Publikasi informasi penataan ruang	Publikasi	1
188	1.03.910175	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	11
189	1.03.910180	Jumlah Unit Air Baku	Unit	0
190	1.03.910181	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	0
191	1.03.910182	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung dan Masyarakat	Orang	0
192	1.03.910183	Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA	Dokumen	0
193	1.03.910184	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST	Dokumen	0
194	1.03.910185	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST	Dokumen	0
195	1.03.910186	Jumlah Sarana Pengumpulan Persampahan	Unit	0
196	1.03.910187	Jumlah Sarana Pengolahan Persampahan	Unit	0
197	1.03.910188	Jumlah Sarana Pemrosesan Akhir Sampah	Unit	0
198	1.03.910189	Jumlah Masyarakat	Orang	0
199	1.03.910191	Jumlah dokumen legal yang disahkan	Dokumen	0
200	1.03.910192	Jumlah Dokumen RTBL	Dokumen	0
201	1.03.910193	Jumlah Kabupaten/Kota yang di bina dan di awasi dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kabupaten/Kota	0
202	1.03.910194	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi	TPA	0
203	1.03.910195	Kapasitas perencanaan TPA	Ton/hari	0
204	1.03.910196	Kapasitas TPA terpakai	Ton/hari	0
205	1.03.910197	Fasilitas penunjang TPA	Paket	0
206	1.03.910198	Kapasitas perencanaan TPST	Ton/hari	0
207	1.03.910199	Kapasitas TPST terpakai	Ton/hari	0
208	1.03.910200	Kapasitas perencanaan SPA	Ton/hari	0
209	1.03.910201	Kapasitas SPA terpakai	Ton/hari	0
210	1.03.910205	Jumlah TPA	Unit	0
211	1.03.910207	Jumlah KK terlayani	KK	0
212	1.03.910208	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	Unit	0
213	1.03.910209	Jumlah Bangunan Gedung Hijau	Bangunan Gedung	0
214	1.03.910210	Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	0
215	1.03.910211	Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani	Unit	0
216	1.03.910212	Luas bangunan gedung negara yang ditangani	M2	0
217	1.03.910213	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	1
218	1.03.910214	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi	Dokumen	0
219	1.03.910215	ketersediaan Pengelola Teknis yaitu tenaga teknis perangkat daerah yang tersertifikasi yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN untuk membantu perangkat daerah dalam pembangunan BGN	Orang	0
220	1.03.910216	Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
221	1.03.910217	Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)	Dokumen	0
222	1.03.910218	Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah	Dokumen	0
223	1.03.910219	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi	Dokumen	1
224	1.03.910227	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Bangunan dan Lingkungan	0
225	1.03.910228	Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	0
226	1.03.910229	Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata,	Kawasan	0
227	1.03.910230	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	1
228	1.03.910231	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provins	Dokumen	0
229	1.03.910232	Permohonan tenaga/tim Pengelola Teknis pada Dinas teknis Provinsi	Dokumen	0
230	1.03.910234	dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)	Dokumen	0
231	1.03.910236	Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah	Dokumen	0
232	1.03.910237	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen	0
233	1.03.910238	Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA)	Dokumen	0
234	1.03.910239	Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah	M2	0
235	1.03.910240	Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	0
236	1.03.910241	Dokumen RTBL di Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0
237	1.03.910242	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Kabupaten/ Kota	0
238	1.03.910243	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan per Kabupaten/Kota	Dokumen	0
239	1.03.910252	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	0
240	1.03.910253	Kapasitas Intalasi Pengolahan Air Limbah Domestik(IPALD)/ sub-sistem pengolahan terpusat	M ³ /Hari	0
241	1.03.910254	Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik	Sambungan Rumah (SR)	0
242	1.03.910255	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	0
243	1.03.910256	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan jasa penyedotan	Rumah	0
244	1.03.910257	Jumlah warga negara penerima layanan penyediaan air minum	Jiwa	0
245	1.03.910267	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	0
246	1.03.910269	Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan pembinaan SPALD	Kabupaten/ Kota	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	1.04.000001	Anggota Fasilitator	Orang	22
2	1.04.000002	Anggota Tim Pendamping	Orang	0
3	1.04.000010	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	170
4	1.04.000011	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	170
5	1.04.000012	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	0
6	1.04.000015	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	20
7	1.04.000019	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	150
8	1.04.000021	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	100
9	1.04.000023	Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Dokumen	2
10	1.04.000025	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	0
11	1.04.000045	Kebijakan Bidang PKP	Dokumen	1
12	1.04.000046	Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina	Kelompok	0
13	1.04.000048	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen	0
14	1.04.000051	Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	0
15	1.04.000052	Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0
16	1.04.000053	Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0
17	1.04.000054	Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0
18	1.04.000055	Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0
19	1.04.000058	Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	0
20	1.04.000059	Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	0
21	1.04.000060	Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	1
22	1.04.000062	Lahan Potensial Milik Pemerintah Provinsi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	0
23	1.04.000064	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	1
24	1.04.000068	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	1
25	1.04.000073	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
26	1.04.000074	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	0
27	1.04.000075	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	1
28	1.04.000076	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1
29	1.04.000077	Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	1
30	1.04.000079	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Laporan	0
31	1.04.000081	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	Laporan	0
32	1.04.000082	Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program	Laporan	0
33	1.04.000084	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	1
34	1.04.000086	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Provinsi berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	1
35	1.04.000090	Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	3
36	1.04.000093	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi	Laporan	11
37	1.04.000094	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Laporan	11
38	1.04.000101	Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Laporan	1
39	1.04.000104	Laporan pelaksanaan proses peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh	Laporan	1
40	1.04.000105	Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	1
41	1.04.000109	Laporan proses penyediaan PSU permukiman	Laporan	1
42	1.04.000112	Lokasi Permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	1
43	1.04.000119	Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	0,43
44	1.04.000128	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha	48,30
45	1.04.000133	Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	105
46	1.04.000138	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi	Orang	100
47	1.04.000147	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	Orang	360
48	1.04.000152	Rencana Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	1
49	1.04.000155	Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang terbangun	Unit Rumah	20
50	1.04.000169	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya	Unit Rumah	74
51	1.04.000170	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Unit Rumah	37
52	1.04.000171	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani	Unit Rumah	170
53	1.04.000172	Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah	150
54	1.04.000185	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	591

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
55	1.04.000186	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit Rumah	8464
56	1.04.000195	Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	20
57	1.04.000199	Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	150
58	1.04.000213	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	100
59	1.04.000214	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	6
60	1.04.000215	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	29
61	1.04.000220	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	100
62	1.04.000262	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh	Rumah Tangga	0
63	1.04.000263	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Rumah Tangga	0
64	1.04.000266	Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	1
65	1.04.000270	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	0
66	1.04.000276	Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)	Unit	0
67	1.04.000277	Jumlah rumah di lokasi rawan bencana	Unit	0
68	1.04.000278	Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan	Unit	0
69	1.04.000283	Jumlah Rumah yang terdampak Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	0
70	1.04.000284	Jumlah Rumah yang Terdampak Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	0
71	1.04.000293	Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	0
72	1.04.000294	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	1
73	1.04.000295	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	0
74	1.04.000300	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni Kepada Masyarakat Terdampak Program Pengentasan Permukiman Kumuh	Laporan	0
75	1.04.000301	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Laporan	0
76	1.04.000304	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program provinsi	Laporan	17
77	1.04.000306	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Laporan	17

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
78	1.04.000317	Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	150
79	1.04.000319	Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit	100
80	1.04.000330	Peta lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh	Dokumen	35
81	1.04.000338	Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh	Dokumen	35
82	1.04.000889	Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh	Unit Rumah	0
83	1.04.000890	Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang memiliki <i>Lack of Access</i> terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh.	Rumah Tangga	0

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	1.05.000002	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penanggulangan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	1
2	1.05.000003	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	1
3	1.05.000004	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penyelamatan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Orang	1
4	1.05.000005	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	0
5	1.05.000011	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	400
6	1.05.000012	Data Kebencanaan	Dokumen	35
7	1.05.000019	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	8
8	1.05.000024	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran	Dokumen	2
9	1.05.000025	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	Dokumen	2
10	1.05.000026	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	2
11	1.05.000028	Dokumen Hasil Pelaksanaan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	Dokumen	35
12	1.05.000043	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1
13	1.05.000044	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1
14	1.05.000045	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1
15	1.05.000046	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1
16	1.05.000047	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Non Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1
17	1.05.000048	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1
18	1.05.000049	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran	Dokumen	35
19	1.05.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	Dokumen	35
20	1.05.000051	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	35

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
21	1.05.000057	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1
22	1.05.000061	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	1
23	1.05.000062	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	35
24	1.05.000067	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	Laporan	0
25	1.05.000068	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Perkara yang dapat disidangkan di tempat	Laporan	0
26	1.05.000069	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen	0
27	1.05.000072	Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) yang Disusun	Dokumen	1
28	1.05.000078	Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	Dokumen	0
29	1.05.000079	Dokumen Rencana Kontijensi	Dokumen	1
30	1.05.000130	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran	Laporan	0
31	1.05.000131	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	Laporan	0
32	1.05.000132	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	0
33	1.05.000168	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	2
34	1.05.000169	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	0
35	1.05.000170	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	4
36	1.05.000171	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur	Laporan	0
37	1.05.000179	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	1
38	1.05.000180	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda	Laporan	1
39	1.05.000185	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah	Laporan	1
40	1.05.000186	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Gubernur	Laporan	0
41	1.05.000192	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	0
42	1.05.000195	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	0
43	1.05.000198	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Laporan	1
44	1.05.000206	Laporan Pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	35
45	1.05.000207	Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	Laporan	1
46	1.05.000212	Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	35
47	1.05.000217	Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	3000
48	1.05.000218	Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	99

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
49	1.05.000223	Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	50
50	1.05.000257	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Orang	1
51	1.05.000263	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dokumen	1
52	1.05.000269	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	520
53	1.05.000270	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	1
54	1.05.000271	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	9
55	1.05.000272	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0
56	1.05.000275	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	3
57	1.05.000281	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0
58	1.05.000283	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	0
59	1.05.000284	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	0
60	1.05.000285	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	1
61	1.05.000286	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0
62	1.05.000287	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		0
63	1.05.000288	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0
64	1.05.000289	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	520
65	1.05.000290	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0
66	1.05.000291	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	1
67	1.05.000292	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	1
68	1.05.000293	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	3
69	1.05.000294	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Laporan	1
70	1.05.000295	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	4
71	1.05.000296	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0
72	1.05.000297	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Laporan	0
73	1.05.000298	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	0
74	1.05.000299	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	0
75	1.05.000300	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Orang	0
76	1.05.000302	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Unit	0
77	1.05.000303	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
78	1.05.000304	Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota DSSD belum terisi!	Dokumen	0
79	1.05.000305	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	0
80	1.05.000306	Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Orang	0
81	1.05.000307	Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	0
82	1.05.000308	Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	0
83	1.05.000309	Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	1
84	1.05.000310	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	1
85	1.05.000311	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	1
86	1.05.000312	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1
87	1.05.000313	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	4
88	1.05.000314	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	1
89	1.05.000315	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0
90	1.05.000316	Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0
91	1.05.000317	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	35
92	1.05.000318	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	35
93	1.05.000319	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0
94	1.05.000320	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Orang	0
95	1.05.000321	Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0
96	1.05.000322	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	1
97	1.05.000323	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	Dokumen	1
98	1.05.000324	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota	Dokumen	0
99	1.05.000325	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	1
100	1.05.000326	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
101	1.05.000327	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Laporan	0
102	1.05.000328	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Laporan	0
103	1.05.000329	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran		0
104	1.05.000330	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Laporan	0
105	1.05.000331	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen	0
106	1.05.000333	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan	0
107	1.05.000335	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	0
108	1.05.000336	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Dokumen	0
109	1.05.000337	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	0
110	1.05.000338	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	0
111	1.05.000339	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Laporan	0
112	1.05.000340	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen	7
113	1.05.000341	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit	295
114	1.05.000342	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	151
115	1.05.000343	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	15
116	1.05.000344	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0
117	1.05.000346	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kawasan	24
118	1.05.000347	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	0
119	1.05.000348	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	2

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 1.06 - URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	1.06.000002	Alat bantu yang diterima lanjut usia telantar di dalam panti	Orang	50
2	1.06.000003	Alat bantu yang diterima penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Unit	50
3	1.06.000004	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Kartu Identitas	Orang	0
4	1.06.000005	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Akta Kelahiran	Orang	0
5	1.06.000006	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	0
6	1.06.000010	Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	1100
7	1.06.000011	Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	1100
8	1.06.000012	Anak telantar yang mendapatkan layanan pengasuhan di dalam panti	Orang	1100
9	1.06.000013	Anak telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	1100
10	1.06.000014	Anak telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1100
11	1.06.000015	Anak telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	1100
12	1.06.000016	Anak telantar yang mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti	Orang	328
13	1.06.000017	Anak telantar yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	1100
14	1.06.000019	Anak telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	1100
15	1.06.000026	Anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat	Orang	328
16	1.06.000030	Bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	3
17	1.06.000032	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	200
18	1.06.000033	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	200
19	1.06.000035	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Kartu Identitas Anak	Orang	0
20	1.06.000036	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran	Orang	0
21	1.06.000037	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk	Orang	0
22	1.06.000042	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	200
23	1.06.000045	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	200
24	1.06.000046	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	200
25	1.06.000048	Gelandangan dan pengemis yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	200
26	1.06.000049	Gelandangan dan pengemis yang tmendapat Fasilitas Pembuatan Surat Nikah	Orang	0
27	1.06.000050	Gelandangan dan pengemis/keluarga yang dipulangkan ke daerah asal	Orang	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
28	1.06.000051	Instruktur yang memberikan Bimbingan Ketrampilan Dasar	Orang	280
29	1.06.000056	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	12764
30	1.06.000057	Keluarga pengganti yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan dan pendampingan berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	Orang	328
31	1.06.000060	Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar	Kegiatan	15
32	1.06.000061	Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Kegiatan	19
33	1.06.000062	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Kegiatan	15
34	1.06.000063	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Kegiatan	3
35	1.06.000064	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	2
36	1.06.000066	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	1
37	1.06.000068	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	300
38	1.06.000069	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	300
39	1.06.000070	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	300
40	1.06.000071	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	300
41	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	300
42	1.06.000073	lanjut usia telantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Orang	300
43	1.06.000076	lanjut usia telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	1285
44	1.06.000077	lanjut usia telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	1285
45	1.06.000078	lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	1285
46	1.06.000079	lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1285
47	1.06.000080	lanjut usia telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	1285
48	1.06.000082	lanjut usia telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	1285
49	1.06.000090	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	400
50	1.06.000092	Makam pahlawan	Makam	1
51	1.06.000095	Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Orang	0
52	1.06.000096	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	120
53	1.06.000097	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	120
54	1.06.000099	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	120
55	1.06.000100	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	120
56	1.06.000101	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	120

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
57	1.06.000103	Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Laporan	1
58	1.06.000104	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	165
59	1.06.000105	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	44
60	1.06.000106	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar	Unit	248
61	1.06.000107	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	294
62	1.06.000108	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana Panti Sosial PPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Unit	54
63	1.06.000109	Pemulasaraan	Kegiatan	15
64	1.06.000114	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	0
65	1.06.000120	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	1655
66	1.06.000121	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	1655
67	1.06.000123	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	1655
68	1.06.000124	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1655
69	1.06.000125	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	1655
70	1.06.000126	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	1655
71	1.06.000127	Penyandang disabilitas terlantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	1655
72	1.06.000140	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal	Orang	370
73	1.06.000141	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk	Orang	0
74	1.06.000142	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran	Orang	0
75	1.06.000143	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Kartu Identitas Anak	Orang	0
76	1.06.000144	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	370
77	1.06.000145	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	370
78	1.06.000146	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	370
79	1.06.000147	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapat fasilitas Pembuatan Surat Nikah	Orang	0
80	1.06.000148	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	370

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
81	1.06.000149	PPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	370
82	1.06.000150	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi	Unit	1
83	1.06.000151	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial anak terlantar	Unit	165
84	1.06.000152	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	44
85	1.06.000153	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial lanjut usia telantar	Unit	248
86	1.06.000154	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	294
87	1.06.000155	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Unit	54
88	1.06.000156	Standar sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	165
89	1.06.000157	Standar sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	44
90	1.06.000158	Standar sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar	Unit	248
91	1.06.000159	Standar sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	294
92	1.06.000160	Standar sarana prasarana Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Unit	54
93	1.06.000161	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	Unit	1
94	1.06.000162	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	576
95	1.06.000163	Tenaga Kesejahteraan Sosial yang memiliki keahlian pengasuhan anak	Orang	39
96	1.06.000164	Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar	Orang	39
97	1.06.000165	Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis	Orang	7
98	1.06.000166	Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia telantar	Orang	40
99	1.06.000167	Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Orang	26
100	1.06.000168	Tenaga pelayanan Panti Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Orang	12
101	1.06.000169	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	0
102	1.06.000170	Taruna Siaga Bencana	Orang	0
103	1.06.000175	Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Dokumen	0
104	1.06.000178	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga	Keluarga	0
105	1.06.000179	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	576
106	1.06.000182	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	0
107	1.06.000184	Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang	0
108	1.06.000189	Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	0
109	1.06.000200	Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Orang	0
110	1.06.000202	Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	0
111	1.06.000203	Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	0
112	1.06.000204	Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
113	1.06.000205	Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	0
114	1.06.000206	Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	0
115	1.06.000207	Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0
116	1.06.000208	Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	0
117	1.06.000209	Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	0
118	1.06.000212	orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	0
119	1.06.000215	Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan mendapat Akreditasi	Lembaga	0
120	1.06.000216	Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	Layanan	0
121	1.06.000217	Puskesmas Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	Lembaga	0
122	1.06.000218	Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	Orang	0
123	1.06.000219	Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	0
124	1.06.000220	Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	0
125	1.06.000221	Anak Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	0
126	1.06.000222	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	0
127	1.06.000223	Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	0
128	1.06.000224	Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Kabupaten/Kota	0
129	1.06.000225	Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	Orang	0
130	1.06.000226	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran	Orang	0
131	1.06.000227	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	Orang	0
132	1.06.000228	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	0
133	1.06.000230	Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial	Orang	0
134	1.06.000233	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Orang	0

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.07.000001	Angkatan Kerja (AK)	Orang	22336198
2	2.07.000002	Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi	Asosiasi	2718
3	2.07.000005	CPMI/PMI	Orang	62276
4	2.07.000008	Data penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang diselesaikan oleh PPNS Ketenagakerjaan	Kasus	2
5	2.07.000009	Data Perusahaan yang mendapatkan layanan uji K3	Perusahaan	29
6	2.07.000010	Data perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	Perusahaan	1190
7	2.07.000018	Instruktur pemerintah	Orang	468
8	2.07.000019	Instruktur swasta	Orang	72
9	2.07.000024	Kapasitas terpasang pemerintah	Orang	4195
10	2.07.000029	kecelakaan kerja	Kasus	32870
11	2.07.000032	Lembaga Bipartit	Lembaga	1967
12	2.07.000035	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi	Unit	3
13	2.07.000036	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi	Unit	39
14	2.07.000038	LKS Tripartit	Lembaga	36
15	2.07.000046	Lulusan pelatihan pemerintah	Orang	4927
16	2.07.000047	Lulusan pelatihan swasta	Orang	80371
17	2.07.000048	Mediator	Orang	111
18	2.07.000049	Nama Program Pelatihan	Program	18
19	2.07.000053	Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan	Orang	350
20	2.07.000056	Pencari Kerja	Orang	0
21	2.07.000057	Pencari kerja ditempatkan	Orang	239025
22	2.07.000058	Pencari kerja terdaftar	Orang	336056
23	2.07.000059	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	7790
24	2.07.000066	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Orang	0
25	2.07.000069	Pengawas ketenagakerjaan	Orang	121
26	2.07.000070	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	412
27	2.07.000072	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	Kasus	498
28	2.07.000074	Peraturan Perusahaan (WLKP Online)	Dokumen	7971
29	2.07.000077	Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)	Dokumen	2813
30	2.07.000078	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	679
31	2.07.000080	Persediaan Tenaga Kerja	Orang	0
32	2.07.000082	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan	16
33	2.07.000083	Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang	Perusahaan	5263
34	2.07.000086	Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar	Perusahaan	250048
35	2.07.000087	Perusahaan peserta jamsostek aktif	Perusahaan	107516
36	2.07.000088	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan	263663
37	2.07.000089	Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	100
38	2.07.000090	Perusahaan yang sudah menerapkan Norma K3	Perusahaan	2959
39	2.07.000091	Perusahaan yang sudah menerapkan SMK3	Perusahaan	805
40	2.07.000092	Perusahaan yang wajib menerapkan Norma K3	Perusahaan	10955
41	2.07.000093	Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3*	Perusahaan	2626
42	2.07.000094	Perush. yang diaudit SMK3	Perusahaan	76
43	2.07.000095	Petugas Antar Kerja	Orang	137
44	2.07.000096	PMI Purna	Orang	60
45	2.07.000097	PMI yang di tempatkan	Orang	62276

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
46	2.07.000100	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Ten aga Kerja	0
47	2.07.000102	Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Unit	410
48	2.07.000109	Tenaga Kerja Disabilitas	Orang	9650
49	2.07.000110	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	Orang	5704243
50	2.07.000114	Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja	Orang	230
51	2.07.000120	Upah Minimum Kabupaten/Kota	Surat Keputusan	1
52	2.07.000121	Upah Minimum Provinsi	Surat Keputusan	1
53	2.07.000122	Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	412
54	2.07.000125	Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi	Dokumen	5
55	2.07.000126	Perusahaan Menengah	Perusahaan	5
56	2.07.000127	Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal	Lembaga	16
57	2.07.000128	Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL	Orang	176749
58	2.07.000129	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan	17

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.08.000007	Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Dokumen	6
2	2.08.000010	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1
3	2.08.000014	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	6
4	2.08.000016	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	1
5	2.08.000022	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kegiatan	3
6	2.08.000027	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	22
7	2.08.000030	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Layanan	144
8	2.08.000033	Lembaga penyedia Layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	0
9	2.08.000035	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	35
10	2.08.000037	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota	Organisasi	11
11	2.08.000040	Organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	25
12	2.08.000046	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	50
13	2.08.000050	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	50
14	2.08.000052	Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	25
15	2.08.000053	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat	Orang	50
16	2.08.000056	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	0
17	2.08.000058	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	35

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
18	2.08.000060	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	35
19	2.08.000062	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	5
20	2.08.000063	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	50
21	2.08.000064	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	2
22	2.08.000065	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Orang	25
23	2.08.000066	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	144

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.09.000021	Jenis pangan lokal	Laporan	1
2	2.09.000076	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	1
3	2.09.000077	Data direktori konsumsi pangan	Laporan	1
4	2.09.000079	Data Jumlah Penduduk	Dokumen	1
5	2.09.000081	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	1
6	2.09.000082	Data Perdagangan Antar Wilayah	Dokumen	1
7	2.09.000084	Data Stok Pangan	Dokumen	1
8	2.09.000086	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	Laporan	1
9	2.09.000087	Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala	Laporan	1
10	2.09.000091	Jenis promosi panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	1
11	2.09.000092	Jumlah Advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1
12	2.09.000096	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	1
13	2.09.000097	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1
14	2.09.000100	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun	Dokumen	1
15	2.09.000102	Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	1
16	2.09.000103	Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	1
17	2.09.000104	Jumlah Edukasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1
18	2.09.000105	Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan	Unit	1
19	2.09.000108	Jumlah izin edar PSAT PD per tahun	Dokumen	1
20	2.09.000111	Jumlah izin rumah pengemasan per tahun	Dokumen	1
21	2.09.000115	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Laporan	1
22	2.09.000116	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1
23	2.09.000118	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)	Laporan	1
24	2.09.000119	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	Laporan	1
25	2.09.000120	Jumlah pelaku usaha pangan lokal	Laporan	1
26	2.09.000123	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	1
27	2.09.000126	Jumlah promosi panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kegiatan	1
28	2.09.000132	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	1
29	2.09.000134	Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Unit	5
30	2.09.000135	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan	Unit	2
31	2.09.000137	Jumlah Usaha Pangan Lokal	Laporan	1
32	2.09.000138	Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi	Laporan	1
33	2.09.000139	Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi	Laporan	1
34	2.09.000145	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	1
35	2.09.000146	Jumlah Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
36	2.09.000147	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1
37	2.09.000152	Data Penerima Manfaat	Dokumen	1
38	2.09.000153	Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1
39	2.09.000154	Jumlah sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan per tahun	Sertifikat	1
40	2.09.000156	Jumlah health certificate (HC) per tahun	Dokumen	1
41	2.09.000157	Jumlah izin sertifikat penerapan penanganan yang baik pangan segar asal tumbuhan (SPPB PSAT) per tahun	Dokumen	1
42	2.09.000158	Rekomendasi Keamanan dan/atau Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	1
43	2.09.000160	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Persentase	176
44	2.09.000161	data pengembangan sektor pangan	Dokumen	1
45	2.09.000162	Data Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Dokumen	0
46	2.09.000163	data cadangan pangan pemerintah provinsi	Dokumen	1
47	2.09.000164	data pengembangan sektor pangan	Dokumen	1
48	2.09.000188	Data pelaku usaha pangan segar	Dokumen	1
49	2.09.000211	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok	Laporan	1
50	2.09.000212	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya	Laporan	1
51	2.09.000213	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara	Ton	621
52	2.09.000214	Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	376
53	2.09.000215	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	496
54	2.09.000216	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	446
55	2.09.000217	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	1
56	2.09.000219	Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Unit	1
57	2.09.000254	Data Hasil Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Dokumen	0

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.10.000001	Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan	Dokumen	10
2	2.10.000005	Berita Acara koordinasi pemanfaatan tanah kosong	Berita Acara	0
3	2.10.000010	Berita acara rapat koordinasi penataan akses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	2
4	2.10.000011	Bidang tanah yang didistribusi	Dokumen	0
5	2.10.000020	Data inventarisasi penggunaan tanah	Dokumen	0
6	2.10.000025	Data inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absente	Dokumen	0
7	2.10.000039	Dokumen fasilitasi penetapan zona nilai tanah	Dokumen	1
8	2.10.000048	Dokumen koordinasi penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria	Dokumen	22
9	2.10.000079	Penetapan Gubernur	Dokumen	4
10	2.10.000087	SK Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria	Dokumen	0
11	2.10.000090	Surat persetujuan pemilik bidang tanah	Surat	0
12	2.10.000092	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	0
13	2.10.000093	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1
14	2.10.000094	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Laporan	1
15	2.10.000095	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	0
16	2.10.000096	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Berita Acara	0
17	2.10.000097	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	3
18	2.10.000101	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Berita Acara	0
19	2.10.000102	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	0
20	2.10.000104	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	0
21	2.10.000107	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan	0
22	2.10.000108	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Berita Acara	0
23	2.10.000109	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Laporan	0
24	2.10.000110	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1
25	2.10.000113	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	3
26	2.10.000123	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
27	2.10.000136	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen	3
28	2.10.000137	umlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan	3
29	2.10.000138	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen	0
30	2.10.000141	Jumlah Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen	0
31	2.10.000147	Jumlah Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen	0
32	2.10.000178	Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	5
33	2.10.000181	Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen	5
34	2.10.000182	Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Dokumen	5
35	2.10.000183	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Dokumen	5
36	2.10.000185	Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan	5
37	2.10.000188	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	5
38	2.10.000190	Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen	0
39	2.10.000191	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	5
40	2.10.000192	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dokumen	0
41	2.10.000193	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	5
42	2.10.000194	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Dokumen	0
43	2.10.000196	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen	5
44	2.10.000197	Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen	1
45	2.10.000200	Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitas Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen	5
46	2.10.000204	Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan	0
47	2.10.000205	Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan	0
48	2.10.000207	Laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	Laporan	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.11.000002	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh provinsi pada n-1	Laporan	0
2	2.11.000003	Daerah yang melakukan kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional	Kabupaten/ Kota	2
3	2.11.000006	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	72
4	2.11.000010	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Laporan	146
5	2.11.000012	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	146
6	2.11.000013	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	36
7	2.11.000015	Data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi	Dokumen	1
8	2.11.000016	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data	26
9	2.11.000017	Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi	Dokumen	1
10	2.11.000019	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	1
11	2.11.000020	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Laporan	146
12	2.11.000021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	85
13	2.11.000022	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	72
14	2.11.000025	Dokumen & Data inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	1
15	2.11.000027	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh provinsi s.d. n-1	Dokumen	15
16	2.11.000029	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	307
17	2.11.000030	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	1
18	2.11.000036	Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	1
19	2.11.000040	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Dokumen	1
20	2.11.000042	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	1
21	2.11.000043	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	1
22	2.11.000045	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh Provinsi s.d. n-1	Dokumen	123
23	2.11.000047	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	33
24	2.11.000050	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	0
25	2.11.000053	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	0
26	2.11.000054	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan	Izin	32
27	2.11.000055	Izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan provinsi s.d. n-1	Izin	28
28	2.11.000057	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	0
29	2.11.000059	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	Izin	29
30	2.11.000061	Kapasitas pengoperasional TPA/TPST Regional	Ton	0
31	2.11.000062	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	1
32	2.11.000064	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	1
33	2.11.000071	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	71
34	2.11.000074	Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH	Kelompok	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
35	2.11.000076	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	7
36	2.11.000079	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	18
37	2.11.000080	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	0
38	2.11.000082	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau provinsi	Dokumen	0
39	2.11.000085	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	1
40	2.11.000086	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	1
41	2.11.000088	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	1
42	2.11.000093	Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	1
43	2.11.000095	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan	Dokumen	0
44	2.11.000098	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1
45	2.11.000099	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1
46	2.11.000101	Laporan hasil Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1
47	2.11.000103	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi di 5 sektor	Dokumen	1
48	2.11.000106	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	1
49	2.11.000107	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	71
50	2.11.000115	Lokasi Proklamasi yang dibina oleh Provinsi	Lokasi	1562
51	2.11.000117	Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	143,50
52	2.11.000119	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	361541,69
53	2.11.000124	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	400
54	2.11.000125	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	264
55	2.11.000126	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	264
56	2.11.000128	Nilai IKA n-1	Poin	72,69
57	2.11.000129	Nilai IKAL n-1	Poin	81,83
58	2.11.000130	Nilai IKLH n-1	Poin	73,85

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
59	2.11.000131	Nilai IKTL n-1	Poin	60,30
60	2.11.000132	Nilai IKU n-1	Poin	77,13
61	2.11.000133	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	144
62	2.11.000134	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	Aduan	33
63	2.11.000136	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	227
64	2.11.000143	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	198
65	2.11.000144	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	198
66	2.11.000147	PPLHD Eksisting	Orang	6
67	2.11.000148	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	5
68	2.11.000149	PPLHD yang dibutuhkan	Orang	12
69	2.11.000154	RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	24
70	2.11.000165	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	915
71	2.11.000166	TPA/TPST Regional yang beroperasi	Unit	0
72	2.11.000168	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/Kegiatan	13
73	2.11.000182	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di provinsi yang beroperasi dan terpelihara	Unit	93
74	2.11.000183	Jumlah data contoh uji	Data	915
75	2.11.000184	Jumlah data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	80
76	2.11.000186	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	307
77	2.11.000187	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	0
78	2.11.000190	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	1
79	2.11.000191	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	1
80	2.11.000194	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	33
81	2.11.000196	Jumlah izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan	Izin	22
82	2.11.000199	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	0
83	2.11.000202	Jumlah izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	Izin	22
84	2.11.000203	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	0
85	2.11.000204	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Dokumen	35
86	2.11.000210	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	Kegiatan	0
87	2.11.000212	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	0
88	2.11.000217	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	3
89	2.11.000219	Jumlah Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	1
90	2.11.000222	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen	1
91	2.11.000223	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	Dokumen	0
92	2.11.000224	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	28

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
93	2.11.000225	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Dokumen	0
94	2.11.000229	Jumlah Laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1
95	2.11.000231	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1
96	2.11.000233	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Dokumen	0
97	2.11.000234	Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.	Dokumen	1
98	2.11.000237	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Dokumen	1
99	2.11.000238	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting	Lembaga	71
100	2.11.000239	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala provinsi eksisting	Lembaga	71
101	2.11.000240	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	71
102	2.11.000243	Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi	Lokasi	0
103	2.11.000246	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	141
104	2.11.000249	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	Aduan	33
105	2.11.000252	Jumlah PPLHD Eksisting	Orang	6
106	2.11.000253	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	6
107	2.11.000254	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	Orang	12
108	2.11.000255	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	1
109	2.11.000258	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di provinsi	Unit	103
110	2.11.000268	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	915
111	2.11.000270	Laporan KLHS kabupaten/kota yang disusun	Dokumen	70
112	2.11.000279	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)	Poin	73,85
113	2.11.000281	Tersusunnya dokumen IKLH	Dokumen	1
114	2.11.000282	Tersusunnya dokumen IKPLHD	Dokumen	1
115	2.11.000291	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan		35
116	2.11.000293	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang diawasi yang telah dilakukan pembinaan dan evaluasi		32
117	2.11.000294	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan denda akibat tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup		1
118	2.11.000296	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	Ton	0
119	2.11.000297	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
120	2.11.000298	Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan	Laporan	0
121	2.11.000300	&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	0
122	2.11.000303	laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	1
123	2.11.000304	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi	Kabupaten/ Kota	35
124	2.11.000305	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuhan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	1
125	2.11.000309	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi	Kabupaten/ Kota	35
126	2.11.000312	Data dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi	Dokumen	215
127	2.11.000313	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkuhan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	19
128	2.11.000314	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen	1
129	2.11.000315	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi	Kabupaten/ Kota	0
130	2.11.000317	Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	3
131	2.11.000318	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan	Usaha	3
132	2.11.000322	Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup	Unit	0
133	2.11.000325	Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Orang	0
134	2.11.000328	Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Dokumen	0
135	2.11.000330	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut	Ton	0
136	2.11.000331	sesuai dengan kewenangannya	Ton	0
137	2.11.000332	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH	Laporan / Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
138	2.11.000333	Laporan hasil telaahan terhadap muatan dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Laporan / Dokumen	18
139	2.11.000334	Data dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi	Dokumen	215
140	2.11.000335	1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	72
141	2.11.000336	Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	72
142	2.11.000337	Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	0
143	2.11.000338	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	0
144	2.11.000339	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	0
145	2.11.000340	&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	0
146	2.11.000341	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	0
147	2.11.000342	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	Usaha	3
148	2.11.000343	Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan / Dokumen	3
149	2.11.000344	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningkatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan	Orang	6
150	2.11.000345	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningkatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan	Orang	6

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
151	2.11.000346	Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	Sekolah	2911
152	2.11.000347	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	Sanksi	7
153	2.11.000348	Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup		4
154	2.11.000356	Data jumlah tonase sampah sungai/DAS provinsi yang ditangani	Ton	0
155	2.11.000357	Timbulan Sampah Harian	Ton	12169,66
156	2.11.000358	Timbulan Sampah Tahunan	Ton	4441927,64

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN

: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.12.000007	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	1
2	2.12.000011	Dokumen hasil kerja sama Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Dokumen	0
3	2.12.000013	Dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.	Dokumen	1
4	2.12.000014	Dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	Dokumen	1
5	2.12.000015	Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen	0
6	2.12.000016	Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	0
7	2.12.000018	Dokumen hasil pemanfaatan data atas Peristiwa Penting	Dokumen	0
8	2.12.000019	Dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	0
9	2.12.000021	Dokumen hasil pemanfaatan data peristiwa kependudukan	Dokumen	0
10	2.12.000022	Dokumen hasil penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	1
11	2.12.000029	Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	0
12	2.12.000030	Dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	1
13	2.12.000031	Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil ditetapkan	Dokumen	0
14	2.12.000036	Dokumen komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Dokumen	1
15	2.12.000038	Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen	1
16	2.12.000041	Dokumen Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Dokumen	0
17	2.12.000043	Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen	1
18	2.12.000045	Dokumen penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen	1
19	2.12.000048	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	Dokumen	1
20	2.12.000049	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	Dokumen	1
21	2.12.000054	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1
22	2.12.000055	Laporan hasil bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	0
23	2.12.000058	Laporan hasil fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1
24	2.12.000059	Laporan hasil fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
25	2.12.000064	Laporan hasil konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	Laporan	1
26	2.12.000065	Laporan hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1
27	2.12.000066	Laporan hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1
28	2.12.000070	Laporan hasil koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1
29	2.12.000075	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1
30	2.12.000080	Laporan hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1
31	2.12.000082	Laporan hasil sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	Laporan	1
32	2.12.000083	Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1
33	2.12.000084	Laporan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Laporan	1
34	2.12.000093	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	35
35	2.12.000095	Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Data	1
36	2.12.000096	Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota	Lembaga	0
37	2.12.000101	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Administrasi Kependudukan	Orang	35

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.13.000008	Buku Register Desa	Dokumen	1
2	2.13.000009	BUM Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	8536
3	2.13.000011	Desa yang melakukan pengembangan Inovasi	Desa	1
4	2.13.000015	Dokumen hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dokumen	1
5	2.13.000022	Dokumen hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	0
6	2.13.000026	Dokumen penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi	Dokumen	7810
7	2.13.000028	Kapasitas SDM aparatur desa	Orang	150
8	2.13.000029	Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak	Dokumen	1
9	2.13.000030	Laporan asil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	35
10	2.13.000032	Laporan Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan Dana Kampung	Laporan	0
11	2.13.000033	Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Laporan	1
12	2.13.000036	Laporan hasil pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Laporan	1
13	2.13.000037	Laporan hasil penyelenggaraan Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota	Laporan	1
14	2.13.000038	Laporan Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	Laporan	1
15	2.13.000039	Laporan pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan	1
16	2.13.000040	Laporan pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Laporan	1
17	2.13.000041	Laporan penyelenggaraan Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Laporan	1
18	2.13.000057	Partisipasi masyarakat Desa	Desa	0
19	2.13.000058	Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa,	Peraturan Desa	0
20	2.13.000061	Pendapatan asli Desa, alokasi dana desa	Dokumen	1
21	2.13.000062	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1
22	2.13.000063	Penyelenggaraan musyawarah desa	Dokumen	0
23	2.13.000064	Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa	Peraturan Kepala Desa	0
24	2.13.000067	Prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa	Dokumen	227
25	2.13.000068	Pranata hukum adat	Dokumen	0
26	2.13.000069	Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	Lembaga Desa dan Desa Adat	35
27	2.13.000070	Sanggar PKK di Kampung	Unit	0
28	2.13.000071	SDM anggota BPD	Orang	0
29	2.13.000073	Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Dokumen	0
30	2.13.000074	Tingkat perkembangan desa	Desa	2208
31	2.13.000076	Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan	Dokumen	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.14.000004	Daerah Penerima Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Laporan	3
2	2.14.000005	Daerah Provinsi yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan	32
3	2.14.000006	Daerah yang telah melaksanakan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Laporan	1
4	2.14.000009	Daerah yang telah Menyerasikan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (iBangga)	Dokumen	32
5	2.14.000010	Daerah/Instansi/Stakeholder yang telah menerima Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Laporan	3
6	2.14.000011	Daerah/Instansi/Stakeholders yang telah menerima Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sertifikat	3
7	2.14.000012	Daerah/Instansi/Stakeholders yang telah menerima Pembinaan terkait Kespro	Sertifikat	1
8	2.14.000013	Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Laporan	0
9	2.14.000017	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	Laporan	0
10	2.14.000020	Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi	Kegiatan	2
11	2.14.000021	Dokumen Hasil Pemetaan KKBPK (Bangga Kencana)	Laporan	1
12	2.14.000023	Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Terhadap Bangga Kencana yang telah diserasikan	Dokumen	1
13	2.14.000027	Dokumen Profil KKBPK (Bangga Kencana)	Dokumen	1
14	2.14.000031	Generasi Berencana (Genre) yang telah menerima Sosialisasi dan Pembinaan	Sertifikat	0
15	2.14.000032	Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Kegiatan	8
16	2.14.000033	IPBK (iBangga) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan yang telah dilaksanakan survey	Kegiatan	0
17	2.14.000037	Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	0
18	2.14.000039	Kampung KB yang telah menerima Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga	Kampung KB	3
19	2.14.000040	Kampung KB yang telah menerima pembinaan	Kegiatan	2
20	2.14.000044	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	10
21	2.14.000045	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	10
22	2.14.000046	Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Instansi	8
23	2.14.000048	Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	0
24	2.14.000055	Materi dan Sarana Promosi, KIE Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Laporan	1
25	2.14.000059	Materi Promosi dan Konseling Kespro dan Hak-Hak Reproduksi yang telah Dikembangkan dan Disediakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
26	2.14.000060	Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	1
27	2.14.000062	Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang telah menerima fasilitasi peningkatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Organisasi	10
28	2.14.000069	Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	0
29	2.14.000076	Organisasi yang telah mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	4
30	2.14.000079	Organisasi yang telah Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Organisasi	4
31	2.14.000080	Organisasi yang telah mengikuti/menerima Pengembangan Strategi Operasional	Organisasi	4
32	2.14.000082	Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Kegiatan	1
33	2.14.000083	Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kegiatan	2
34	2.14.000084	Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kegiatan	1
35	2.14.000085	Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Kegiatan	2
36	2.14.000093	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Kegiatan	2
37	2.14.000096	Penyediaan & Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Laporan	2
38	2.14.000097	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Laporan	2
39	2.14.000098	Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan yang telah diberi pembinaan dan pengawasan	Sertifikat	0
40	2.14.000099	Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga yang telah mendapat dukungan	Kegiatan	0
41	2.14.000100	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	0
42	2.14.000101	PIK-R yang telah mendapat/mengikuti Pengembangan & Perbanyak Materi Substansi tentang PIK-R, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Organisasi	1
43	2.14.000102	PIK-R yang telah menerima/mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kelompok di Kampung KB	Organisasi	3
44	2.14.000103	PIK-R yang telah mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana	Organisasi	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
45	2.14.000106	Prototype Materi Pembangunan Keluarga yang telah dikembangkan Sesuai dengan Kearifan Lokal	Unit	0
46	2.14.000114	Strategi Operasional Advokasi, Promosi yang telah Sesuai Kearifan Lokal	Laporan	1
47	2.14.000115	Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kespro yang telah Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1
48	2.14.000118	Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	4

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.15.000000	Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum	Dokumen	19724
2	2.15.000003	Alat pemberi isyarat lalu lintas	Unit	9
3	2.15.000004	Alat pengawasan dan pengamanan jalan	Unit	7
4	2.15.000005	Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0
5	2.15.000006	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Unit	55
6	2.15.000009	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal	Unit	37
7	2.15.000010	Analisis dampak lalu lintas	Dokumen	32
8	2.15.000018	Buku kerja rancang bangun	Dokumen	2
9	2.15.000021	Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dokumen	24
10	2.15.000024	Data fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan regional yang tersedia	Unit	0
11	2.15.000025	Data Fasilitas Pelayanan Angkutan PelabuhanSungai dan Danau yang Tersedia	Unit	28
12	2.15.000030	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan	Dokumen	24
13	2.15.000031	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah Sosialisasikan	Dokumen	5
14	2.15.000032	Data Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	8
15	2.15.000034	Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan	Dokumen	0
16	2.15.000037	Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	Dokumen	0
17	2.15.000039	Data Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dengan ketentuan orangperseorangan warga negara Indonesia atau badan usahadengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yangmemenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki olehAwak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	Dokumen	57
18	2.15.000041	Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota provinsi	Dokumen	0
19	2.15.000046	Data Audit Terminal	Dokumen	21702
20	2.15.000048	Data auditor LLAJ Provinsi	Dokumen	0
21	2.15.000053	Data dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan	Dokumen	1
22	2.15.000058	Data dokumen perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
23	2.15.000062	Data dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	1
24	2.15.000066	Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe B	Dokumen	23
25	2.15.000070	Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal tipe B	Dokumen	23
26	2.15.000072	Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	23
27	2.15.000074	Data inspeksi Terminal	Dokumen	0
28	2.15.000076	Data Inspektor LLAJ provinsi	Dokumen	0
29	2.15.000078	Data jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota	Unit	0
30	2.15.000081	Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	1
31	2.15.000087	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Dokumen	278254
32	2.15.000091	Data laporan Angkutan Laut Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	0
33	2.15.000093	Data laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	7
34	2.15.000095	Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dokumen	5
35	2.15.000096	Data Laporan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	0
36	2.15.000099	Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	0
37	2.15.000101	Data Laporan Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	0
38	2.15.000104	Data Laporan perizinan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	0
39	2.15.000107	Data laporan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan	Laporan	0
40	2.15.000111	Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan	Laporan	1
41	2.15.000114	Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak	Dokumen	81
42	2.15.000115	Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik	Dokumen	81
43	2.15.000116	Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat	Dokumen	81
44	2.15.000142	Data Perlengkapan Jalan	Dokumen	224365
45	2.15.000143	Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	215874
46	2.15.000152	Data Perusahaan angkutan Umum provinsi	Dokumen	0
47	2.15.000154	Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi	Dokumen	0
48	2.15.000155	Data prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi	Dokumen	0
49	2.15.000157	Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1
50	2.15.000171	Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe B	Dokumen	127
51	2.15.000173	Data Terminal	Dokumen	23
52	2.15.000175	Data Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	23
53	2.15.000177	Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	23
54	2.15.000182	Dokumen kebijakan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang telah di tetapkan	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
55	2.15.000185	Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian	Dokumen	0
56	2.15.000188	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	6
57	2.15.000189	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	38
58	2.15.000197	Hasil Penilaian Tim Evaluasi	Dokumen	32
59	2.15.000198	Izin Lingkungan sesuai denganketentuan perundang-undangan	Dokumen	0
60	2.15.000199	Jarak Pelayanan	Dokumen	0
61	2.15.000201	Kebutuhan angkutan (demanci);	Dokumen	0
62	2.15.000202	Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan	Dokumen	7
63	2.15.000210	Marka Jalan	Unit	223582
64	2.15.000211	Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0
65	2.15.000224	Rambu Lalu Lintas	Unit	181
66	2.15.000225	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0
67	2.15.000228	Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;	Dokumen	0
68	2.15.000229	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Region	Dokumen	0
69	2.15.000231	Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); .	Dokumen	1
70	2.15.000232	Rencana induk terminal	Dokumen	8
71	2.15.000246	Data indentifikasi masalah lalu lintas	Dokumen	7
72	2.15.000250	Peraturan Gubernur mengenai Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen	1
73	2.15.000254	Data Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan	Dokumen	6
74	2.15.000257	Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor	Dokumen	19724
75	2.15.000261	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	16
76	2.15.000266	SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi	Orang	0
77	2.15.000267	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)	Lokasi	106
78	2.15.000270	Halte	Unit	345
79	2.15.000272	Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum	Dokumen	0
80	2.15.000273	Laporan Pengawasan ketertiban terminal	Laporan	23
81	2.15.000274	Alat Penerangan Jalan	Unit	402
82	2.15.000276	Data Prasarana Jalan	Dokumen	0
83	2.15.000285	bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan	Dokumen	1
84	2.15.000289	Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	1
85	2.15.000290	Data jumlah barang	Unit	2115800
86	2.15.000291	Data jumlah penumpang	Orang	27316620
87	2.15.000294	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual	Unit	0
88	2.15.000295	Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang	Kejadian	110
89	2.15.000296	dokumen penetapan lokasi Bandar Udara	Dokumen	6
90	2.15.000301	persetujuan lingkungan	Dokumen	0
91	2.15.000306	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal	Orang	127
92	2.15.000313	Jumlah perlintasan sebidang	Lokasi	25

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
93	2.15.000314	Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500	Unit	0
94	2.15.000315	Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7	Unit	0
95	2.15.000324	Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani	Unit	7
96	2.15.000331	Data jumlah dan lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	8
97	2.15.000332	Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	Dokumen	0
98	2.15.000342	Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau	Dokumen	0
99	2.15.000343	Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Orang	38
100	2.15.000345	Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Regulasi	0
101	2.15.000348	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan	Laporan	3
102	2.15.000350	Pelabuhan Sungai dan Danau	Unit	17
103	2.15.000352	Data badan usaha yang telah memperoleh izin dari Gubernur untuk Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas di Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	631
104	2.15.000353	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau	Dokumen	0
105	2.15.000356	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan	Dokumen	0
106	2.15.000370	BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	0
107	2.15.000373	Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	0
108	2.15.000376	SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	1
109	2.15.000377	Data jumlah izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan	Unit	4
110	2.15.000378	Unit Penyelengggara Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	0
111	2.15.000379	Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dokumen	30
112	2.15.000395	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Laporan	1
113	2.15.000397	Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandara	Dokumen	0
114	2.15.000398	Rencana Tata Ruang Wialayah	Dokumen	1
115	2.15.000399	Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan	Laporan	0
116	2.15.000402	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian	Laporan	0
117	2.15.000411	Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan	Unit	25
118	2.15.000412	Alat Pendeteksi Kereta Api	Unit	10

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
119	2.15.000413	Panic Button/ Emergency Lamp	Unit	0
120	2.15.000414	Pos Jaga	Unit	3
121	2.15.000415	Penjaga Perlintasan Kereta Api	Orang	12
122	2.15.000416	Rambu Peringatan	Unit	8
123	2.15.000417	Rambu Larangan	Unit	0
124	2.15.000419	Pita Penggaduh	Meter	8491
125	2.15.000420	Yellow Box	Meter	0
126	2.15.000421	Penjaga Perlintasan Kereta Api	Orang	12

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.16.000067	Nama Domain Pemerintah Daerah	Domain	1
2	2.16.000068	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah		60
3	2.16.000070	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		1
4	2.16.000071	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		1
5	2.16.000072	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		1
6	2.16.000075	Data dan informasi dibagipakaikan	Data	5877
7	2.16.000078	Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	1
8	2.16.000079	Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	1
9	2.16.000080	Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	1
10	2.16.000081	Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	1
11	2.16.000082	Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	50
12	2.16.000084	Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupaten/kota	34
13	2.16.000085	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	25
14	2.16.000086	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	14
15	2.16.000087	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	4
16	2.16.000088	Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda		19000
17	2.16.000089	Perangkat Daerah yang memiliki akses internet	Perangkat Daerah	50
18	2.16.000090	Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	50
19	2.16.000092	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi	15
20	2.16.000093	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi	2
21	2.16.000094	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	4
22	2.16.000095	Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	8
23	2.16.000096	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	117
24	2.16.000097	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	338
25	2.16.000098	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	Surat Keputusan	1
26	2.16.000099	Server yang dikelola pemerintah daerah	Unit	48
27	2.16.000100	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	Persentase	62
28	2.16.000105	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE	Dokumen	1
29	2.16.000106	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen	1
30	2.16.000107	SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	Orang	31
31	2.16.000110	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE	Orang	557
32	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	315

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
33	2.16.000114	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan	261
34	2.16.000115	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan	13450
35	2.16.000116	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	Kanal	7
36	2.16.000117	Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau	Laporan	129
37	2.16.000120	Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	1
38	2.16.000121	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan	6
39	2.16.000124	Konten Foto	Konten Digital	1400
40	2.16.000125	Konten Teks	Konten	1524
41	2.16.000126	Konten Grafis	Konten	52
42	2.16.000127	Konten Audio Video	Konten	221
43	2.16.000128	Konten Audio	Konten	1224,00
44	2.16.000129	Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	Konten	58,00
45	2.16.000130	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	8
46	2.16.000131	Diseminasi melalui Media Berbayar	Kegiatan	1068
47	2.16.000132	Diseminasi melalui Earned Media	Kegiatan	6
48	2.16.000133	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	800
49	2.16.000134	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	1178
50	2.16.000135	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang	6242401
51	2.16.000142	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media	2
52	2.16.000143	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda		748
53	2.16.000144	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	1542
54	2.16.000145	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers	1000
55	2.16.000146	Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas	75
56	2.16.000148	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	5945
57	2.16.000149	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	28
58	2.16.000150	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	0
59	2.16.000151	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	20
60	2.16.000152	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang	49
61	2.16.000153	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	Orang	16
62	2.16.000154	Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan	27
63	2.16.000156	Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	Unit	1
64	2.16.000157	Kab/Kota di wilayah provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	kabupaten/kota	35
65	2.16.000160	Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah	Media	116
66	2.16.000162	Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot	Titik	1047

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.17.000002	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Dokumen	2
2	2.17.000003	Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Dokumen	0
3	2.17.000012	Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Unit Usaha	5305
4	2.17.000014	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	400
5	2.17.000015	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Unit Usaha	5305
6	2.17.000039	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	385
7	2.17.000040	Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi	Unit Usaha	385
8	2.17.000041	Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Unit Usaha	385
9	2.17.000042	Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan	Unit Usaha	48
10	2.17.000043	Unit Usaha yang memenuhi restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	732
11	2.17.000044	Unit Usaha yang memenuhi standarisasi	Unit Usaha	100
12	2.17.000046	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Unit Usaha	732
13	2.17.000047	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	497
14	2.17.000048	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi	Unit Usaha	732
15	2.17.000049	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha	Unit Usaha	732
16	2.17.000051	Unit Usaha Yang produktif	Unit Usaha	385
17	2.17.000052	Unit Usaha Yang produktif, bernilai Tambah	Unit Usaha	385
18	2.17.000053	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha	Unit Usaha	285

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.18.000001	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	Orang	58
2	2.18.000002	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	Orang	73
3	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	17142
4	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	654
5	2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	654
6	2.18.000007	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan.	Orang	87
7	2.18.000008	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Non Perizinan.	Orang	87
8	2.18.000012	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Perizinan;	Orang	87
9	2.18.000015	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Sistem Elektronik.	Orang	6140
10	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;	Orang	287994
11	2.18.000018	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	0
12	2.18.000019	Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.	Dokumen	0
13	2.18.000020	Peraturan daerah tentang promosi penanaman modal.	Dokumen	0
14	2.18.000022	Peraturan daerah/Provinsi tentang Pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;	Dokumen	0
15	2.18.000023	Peraturan daerah/Provinsi tentang Pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	0
16	2.18.000024	Peraturan daerah/Provinsi tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.	Dokumen	0
17	2.18.000025	Peraturan daerah/provinsi tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif.	Dokumen	0
18	2.18.000027	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	0
19	2.18.000029	Peta Potensi Investasi Provinsi .	Dokumen	1
20	2.18.000030	Rencana Minat Investasi di dalam negeri;	Dokumen	89
21	2.18.000032	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.	Unit Usaha	212
22	2.18.000033	Unit Usaha yang memenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	0
23	2.18.000034	Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.	Unit Usaha	19061
24	2.18.000035	Unit Usaha yang memenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	0
25	2.18.000036	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Unit Usaha	2
26	2.18.000037	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.	Unit Usaha	2
27	2.18.000038	Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	0
28	2.18.000039	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	0
29	2.18.000040	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	0
30	2.18.000043	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	9
31	2.18.000044	Dokumen promosi penanaman modal	Dokumen	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.19.000064	Pemuda Kader	Orang	750
2	2.19.000065	Pemuda Pelopor	Orang	370
3	2.19.000066	Pemuda wirausaha muda	Orang	700
4	2.19.000068	Pemuda Berprestasi	Orang	0
5	2.19.000069	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	35
6	2.19.000070	Sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	0
7	2.19.000071	Organisasi kepemudaan berprestasi	Organisasi	35
8	2.19.000072	Sentra kewirausahaan pemuda	Sentra	35
9	2.19.000073	Atlet/olahragawan talenta muda	Orang	278
10	2.19.000075	Atlet/olahragawan disabilitas	Orang	1150
11	2.19.000076	Kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah	Kegiatan	1
12	2.19.000078	Kompetisi/kejuaraan single event		11
13	2.19.000079	Kompetisi/kejuaraan multi event	Kegiatan	3
14	2.19.000080	Kompetisi/kejuaraan paralimpik	Kegiatan	1
15	2.19.000081	Pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang	1773
16	2.19.000082	Organisasi Olahraga	Lembaga	111
17	2.19.000083	Wasit	Orang	11
18	2.19.000084	Sentra pembinaan Olahraga	Lembaga	2
19	2.19.000085	Sarana Olahraga	Unit	2
20	2.19.000086	Prasarana Olahraga	Unit	14
21	2.19.000087	Sarana Olahraga Disabilitas	Unit	0
22	2.19.000088	Prasarana olahraga disabilitas	Unit	1
23	2.19.000089	Organisasi kepramukaan	Organisasi	1
24	2.19.000090	Tenaga pendidik pramuka	Orang	1413
25	2.19.000091	Kegiatan pramuka	Orang	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.20.000019	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	7
2	2.20.000020	Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data		9
3	2.20.000024	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	24
4	2.20.000025	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	110
5	2.20.000026	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	0
6	2.20.000028	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	100
7	2.20.000030	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	7
8	2.20.000050	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah	Kegiatan	7
9	2.20.000051	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk	Kegiatan	5
10	2.20.000052	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persentase	55,50
11	2.20.000053	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda	Kegiatan	7
12	2.20.000054	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda	Persentase	33,30
13	2.20.000055	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persentase	55,50
14	2.20.000056	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan	Kegiatan	0
15	2.20.000057	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persentase	71,40
16	2.20.000058	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persentase	200
17	2.20.000059	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kegiatan	18
18	2.20.000060	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah	Kegiatan	2

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.21.000001	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	0
2	2.21.000002	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	0
3	2.21.000003	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	1
4	2.21.000004	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik	Laporan	32
5	2.21.000005	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Non Elektronik	Laporan	0
6	2.21.000006	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	4
7	2.21.000007	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	50
8	2.21.000008	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	50

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.22.000040	Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Unit	2020
2	2.22.000043	Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	Laporan	1
3	2.22.000065	Laporan kegiatan/event terkait pengayaan cagar budaya	Laporan	14
4	2.22.000066	Laporan kegiatan/event terkait pengembangan cagar budaya	Laporan	14
5	2.22.000116	Objek Cagar Budaya yang diregistrasi	Objek	17
6	2.22.000132	Objek pemajuan tradisi budaya yang di kembangkan	Objek	44
7	2.22.000157	Permuseuman yang dikelola	Unit	1
8	2.22.000181	Sarana dan Prasarana Museum yang dipelihara	Unit	2020
9	2.22.000183	Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia	Unit	4
10	2.22.000205	Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	44
11	2.22.000234	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	Dokumen	1
12	2.22.000236	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan	20
13	2.22.000237	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan	20
14	2.22.000238	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Laporan	1
15	2.22.000239	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	Orang	44
16	2.22.000241	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Objek	43
17	2.22.000246	Pengelolaan Koleksi Museum	Unit	2020

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.23.000054	Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi	Perpustakaan	36
2	2.23.000055	Perpustakaan Khusus kewenangan Provinsi	Perpustakaan	21
3	2.23.000056	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	2179
4	2.23.000057	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan provinsi	Perpustakaan	36
5	2.23.000058	Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah kewenangan Provinsi	Perpustakaan	2334
6	2.23.000059	Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi	Perpustakaan	187
7	2.23.000060	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	129590
8	2.23.000061	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	0
9	2.23.000062	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah binaan Provinsi	Orang	29475
10	2.23.000063	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus binaan Provinsi	Orang	0
11	2.23.000064	Koleksi Judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi	Judul	203085
12	2.23.000065	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Provinsi	Judul	20674
13	2.23.000066	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah kewenangan Provinsi	Judul	1224393
14	2.23.000067	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi	Judul	20506
15	2.23.000068	Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan milik provinsi	Eksemplar	6905
16	2.23.000069	Penerbit dan Produsen Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)	Penerbit/produsen	194
17	2.23.000070	Jumlah Koleksi hasil pelaksanaan KCKR yang diolah	Eksemplar	3000
18	2.23.000071	Penerbitan katalog induk Daerah	Entry	1611
19	2.23.000072	Penerbitan Bibliografi Daerah	naskah	1
20	2.23.000073	Pelestarian naskah kuno milik Provinsi	naskah	9
21	2.23.000076	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki	Eksemplar	593
22	2.23.000077	Jumlah promosi gemar membaca tingkat provinsi	kegiatan	6
23	2.23.000078	Tenaga Teknis Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	217
24	2.23.000079	Tenaga Teknis Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	12
25	2.23.000080	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Menengah binaan Provinsi	Orang	1064
26	2.23.000081	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Khusus binaan Provinsi	Orang	33
27	2.23.000082	Pustakawan Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	319
28	2.23.000083	Pustakawan Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	5
29	2.23.000084	Pustakawan Perpustakaan satuan pendidikan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi	Orang	15
30	2.23.000085	Pustakawan pada perpustakaan satuan pendidikan Khusus yang binaan Provinsi	Orang	0
31	2.23.000086	Anggota perpustakaan umum binaan Provinsi	Orang	350848
32	2.23.000087	Anggota perpustakaan khusus binaan Provinsi	Orang	3333
33	2.23.000088	Anggota perpustakaan sekolah menengah binaan Provinsi	Orang	115629
34	2.23.000089	Anggota perpustakaan satuan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Provinsi	Orang	228
35	2.23.000090	Siswa sekolah menengah dan khusus yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	Orang	308
36	2.23.000091	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	Orang	745

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
37	2.23.000092	Pegiat literasi binaan provinsi	Orang	20
38	2.23.000093	Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	1595
39	2.23.000094	Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan	1284

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	2.24.000001	Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	15647
2	2.24.000002	Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	891
3	2.24.000005	Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	42075
4	2.24.000006	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	42075
5	2.24.000015	Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	14160
6	2.24.000017	Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	14160
7	2.24.000019	Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	14160
8	2.24.000028	Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	3570
9	2.24.000029	Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Berkas	9970
10	2.24.000031	Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	2828
11	2.24.000036	Data Base Arsiparis	Orang	138

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.25.000010	Data pengendalian residu	Dokumen	1
2	3.25.000021	Data pengendalian penyakit ikan	Dokumen	1
3	3.25.000062	Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan	Dokumen	1
4	3.25.000086	Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	0
5	3.25.000087	Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	141
6	3.25.000091	Jenis pelaksanaan program mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan jenis dan tingkat resiko bencana	Kegiatan	0
7	3.25.000099	Kapal perikanan yang diawasi dalam Kegiatan penangkapan ikan	Unit	101
8	3.25.000105	Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh pelatihan penguatan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	0
9	3.25.000108	Kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	40
10	3.25.000111	Kelompok pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	Kelompok	0
11	3.25.000123	Laporan hasil pengujian sampel	Dokumen	2
12	3.25.000128	Luasan kawasan konservasi yang dicadangkan	Ha	12996,99
13	3.25.000129	Luasan kawasan konservasi yang ditetapkan	Ha	4820,21
14	3.25.000130	Luasan wilayah perairan pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi	Ha	7,20
15	3.25.000131	Masyarakat yang memperoleh pelatihan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Orang	140
16	3.25.000134	Obat Ikan	Unit	1
17	3.25.000151	Pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	Orang	0
18	3.25.000185	Personel Pengawas Perikanan	Orang	4
19	3.25.000189	Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	1
20	3.25.000190	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	436592,13
21	3.25.000193	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	1
22	3.25.000196	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi buku kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	1
23	3.25.000198	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	1
24	3.25.000199	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Dokumen	1
25	3.25.000203	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi teknis Perizinan Pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	0
26	3.25.000226	sampel yang diuji	Sampel	2271
27	3.25.000227	Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	7

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
28	3.25.000230	speedboat pengawas	Unit	3
29	3.25.000260	Wadah Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	41043,03
30	3.25.000261	Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan	11,00
31	3.25.000262	Unit penangkapan ikan	Unit	0
32	3.25.000263	Kapal di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Unit	383
33	3.25.000265	Kelompok masyarakat Pengawas yang melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha kelautan dan perikanan	Kelompok	16
34	3.25.000269	Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi	Unit	3
35	3.25.000270	Unit kapal yang aktif (Memiliki Izin yang masih berlaku)	Unit	0
36	3.25.000271	Pelaku usaha perikanan tangkap (stakeholder)	Pelaku Usaha	0
37	3.25.000272	Permohonan lokasi pengembangan pelabuhan perikanan yang disertai dengan Detail Engineering Designed (DED)	Dokumen	1
38	3.25.000273	Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang ditolak	Dokumen	0
39	3.25.000274	Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diproses lebih lanjut	Dokumen	0
40	3.25.000275	Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diproses dengan catatan	Dokumen	0
41	3.25.000276	Penggunaan Pakan Pembudidayaan Ikan di Laut	Ton	0
42	3.25.000277	Poduksi benih Ikan Laut	Ekor	0
43	3.25.000278	Jumlah produksi bibit rumput Laut	Ton	0
44	3.25.000282	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang masuk	Dokumen	0
45	3.25.000283	permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diproses	Dokumen	0
46	3.25.000284	Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang diterbitkan	Dokumen	0
47	3.25.000285	Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang masuk	Dokumen	0
48	3.25.000286	Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diproses	Dokumen	0
49	3.25.000287	Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diterbitkan	Dokumen	0
50	3.25.000291	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang masuk	Dokumen	0
51	3.25.000292	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diproses	Dokumen	0
52	3.25.000293	Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	Dokumen	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
53	3.25.000296	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang ditolak	Dokumen	0
54	3.25.000297	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses lebih lanjut	Dokumen	208
55	3.25.000298	Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses dengan catatan	Dokumen	0
56	3.25.000299	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang masuk	Dokumen	407
57	3.25.000300	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diproses	Dokumen	407
58	3.25.000301	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	Dokumen	407
59	3.25.000303	Kasus pelanggaran bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Perkara	2
60	3.25.000304	Peta rawan pelanggaran usaha bidang pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1
61	3.25.000305	Program dan kegiatan terkait pelabuhan perikanan	Program/ Kegiatan	1
62	3.25.000306	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi teknis perizinan berusaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Dokumen	1
63	3.25.000310	Pelabuhan di Wilayah Perairan Darat	Pelabuhan	0
64	3.25.000311	Jumlah dan jenis alat tangkap di Wilayah Perairan Darat	Unit	42271
65	3.25.000312	Kapal di Wilayah Perairan Darat	Unit	9946
66	3.25.000313	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	1
67	3.25.000318	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	1
68	3.25.000320	Lokasi rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Lokasi	8
69	3.25.000321	Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Ha	8,95
70	3.25.000323	Provinsi yang telah menyusun materi teknis muatan pesisir pada RTRW Provinsi/dokumen final RZWP-3-K	Dokumen	1
71	3.25.000324	Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kelompok	40
72	3.25.000325	Data pelanggaran yang terjadi di Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Kasus	4
73	3.25.000326	Kasus pelanggaran perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	Kasus	14
74	3.25.000328	Personel Pengawas Perikanan	Orang	22

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
75	3.25.000330	Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau kapal pengawas perikanan	Pelaku Usaha	66
76	3.25.000331	Kasus pelanggaran perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kasus	4
77	3.25.000333	Pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Pelaku Usaha	5
78	3.25.000334	Kasus pelanggaran perikanan budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Perkara	0
79	3.25.000336	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang ditolak	Dokumen	25
80	3.25.000337	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang disetujui	Dokumen	226
81	3.25.000338	Kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang disetujui dengan catatan	Dokumen	226
82	3.25.000339	Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan	Dokumen	0
83	3.25.000343	Saluran di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meter Lari	32639
84	3.25.000344	Sampel pengujian penyakit ikan di laut yang diuji	Sampel	458
85	3.25.000345	Sumber Daya Manusia Penguji kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan di laut	Orang	8
86	3.25.000346	Lahan pembudidayaan ikan	Ha	40871
87	3.25.000347	Kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT yang ditolak	Dokumen	95
88	3.25.000348	Kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT yang disetujui	Dokumen	4470
89	3.25.000349	Kapal perikanan dengan ukuran sampai 10 GT yang disetujui dengan catatan	Dokumen	2739
90	3.25.000362	Wadah Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	241
91	3.25.000363	Penggunaan Pakan ikan untuk Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	Ton	630612,73
92	3.25.000365	Produksi Benih	Ekor	10095184550
93	3.25.000366	Produksi induk	Ekor	7700
94	3.25.000367	Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	1
95	3.25.000368	Laporan hasil pengujian sampel pembudidayaan ikan di laut	Dokumen	2271
96	3.25.000371	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha	Pelaku Usaha	114

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
97	3.25.000372	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	Pelaku Usaha	30
98	3.25.000373	Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha	Pelaku Usaha	0
99	3.25.000374	Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Risiko	Pelaku Usaha	0
100	3.25.000375	Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan insentif	Pelaku Usaha	0
101	3.25.000376	Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan Fasilitas	Pelaku Usaha	152
102	3.25.000377	Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1
103	3.25.000378	Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	114
104	3.25.000379	Pelaku Usaha yang diberikan Fasilitas terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	152
105	3.25.000380	Pelaku Usaha yang diberikan Pemantauan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	114
106	3.25.000381	Pelaku Usaha yang diberikan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	114
107	3.25.000382	Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dalam penyusunan prosedur dan penerapan persyaratan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	114

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
108	3.25.000383	Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen, validasi, dan penerapan sistem mutu terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	114
109	3.25.000385	Sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Unit	398
110	3.25.000386	Prasarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Unit	398
111	3.25.000387	Volume produk Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Ton	968353
112	3.25.000388	Volume Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Ton	299838,50
113	3.25.000389	Sarana Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Unit	0
114	3.25.000390	Prasarana Pada Pemasaran Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Unit	0
115	3.25.000392	Hari Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	10
116	3.25.000393	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Yang Dirawat	Unit	3
117	3.25.000394	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP)	Forum	1
118	3.25.000395	Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan	Pelaku Usaha	35
119	3.25.000396	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tersedia dan terbentuk	Orang	25
120	3.25.000397	Sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	15
121	3.25.000398	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Yang Diadakan	Unit	0
122	3.25.000399	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Unit	0
123	3.25.000400	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Perkara	0
124	3.25.000412	Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	0
125	3.25.000413	Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Peraturan	1
126	3.25.000414	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen	0
127	3.25.000415	Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1
128	3.25.000416	Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Pelaku Usaha	25799
129	3.25.000418	Volume Produksi Garam	Ton	177324,36
130	3.25.000419	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi	Lokasi	24
131	3.25.000420	Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Di Laut sampai dengan 12 Mil	Pelaku Usaha	74
132	3.25.000421	Kasus pelanggaran usaha pengolahan dan/atau usaha pemasaran hasil perikanan	Perkara	3

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
133	3.25.000422	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Lokasi	3
134	3.25.000428	Lahan Garam	Ha	8267,80
135	3.25.000429	Petambak Garam	Orang	6420
136	3.25.000430	Dokumen Perencanaan Usaha Pergaraman	Dokumen	1
137	3.25.000431	Gudang Garam	Unit	55
138	3.25.000432	Sarana Usaha Pergaraman	Unit	75
139	3.25.000433	Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha	Pelaku Usaha	0
140	3.25.000434	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Kelompok	0
141	3.25.000435	Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut untuk Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha	0
142	3.25.000436	Kegiatan Turnamen Memancing Di Wilayah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kegiatan	0
143	3.25.000437	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Dokumen	1
144	3.25.000438	Luas kawasan ekosistem blue carbon Pada Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya	Ha	9484,96
145	3.25.000439	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Kelompok Masyarakat	0
146	3.25.000440	Pelaku usaha pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan Sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	9651
147	3.25.000441	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi	0
148	3.25.004101	Rekomendasi untuk perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	Rekomendasi	14
149	3.25.004106	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan	Dokumen	1
150	3.25.004107	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan	Dokumen	1
151	3.25.004108	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan	Pelaku Usaha	14
152	3.25.004109	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan	Pelaku Usaha	5
153	3.25.004110	SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	1
154	3.25.004111	SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pemasaran ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	1
155	3.25.004112	SOP penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi		1
156	3.25.004113	Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari tangkapan yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	Ton	410745,59

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
157	3.25.004114	Volume ikan (termasuk bagian-bagiannya) yang berasal dari budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	Ton	554810,18
158	3.25.004124	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	Dokumen	208
159	3.25.004125	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang masuk	Dokumen	208
160	3.25.004126	Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diproses	Dokumen	208
161	3.25.004138	Prosedur, syarat, dan tata cara penerbitan Rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Dokumen	1
162	3.25.004140	Rekomendasi izin tanda daftar Kapal Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dokumen	2630
163	3.25.004141	Permohonan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT yang diproses	Dokumen	2630
164	3.25.004142	UPT Pengelola	Unit	1
165	3.25.004145	Penyediaan fasilitas Penunjang	Unit	11
166	3.25.004146	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	6191583705718
167	3.25.004147	Persyaratan penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi	Dokumen	1
168	3.25.004148	SOP penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan sesuai dengan kewenangan provinsi	Dokumen	1
169	3.25.004149	Persyaratan penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan kewenangan provinsi	Dokumen	1
170	3.25.004150	SOP penerbitan izin/rekomendasi teknis bidang pembudidaya ikan sesuai dengan kewenangan provinsi	Dokumen	1
171	3.25.004157	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
172	3.25.004158	Data potensi lahan budidaya berdasarkan RZWP3K	Dokumen	1
173	3.25.004159	Data lahan existing yang sudah dimanfaatkan untuk perikanan budidaya laut	Dokumen	1
174	3.25.004160	Data jenis ikan / komoditas yang dibudidayakan	Dokumen	1
175	3.25.004161	Data produksi benih dari unit pembenihan/hatchery	Dokumen	1
176	3.25.004163	Data pelaku usaha / tenaga kerja bidang pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kab/kota	Dokumen	1
177	3.25.004164	Data pelaku usaha / tenaga kerja bidang pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kab/kota yang memiliki kartu KUSUKA	Dokumen	1
178	3.25.004169	Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat Ikan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
179	3.25.004170	Gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan tingkat provinsi	Kelompok	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
180	3.25.004171	Sarana laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	3
181	3.25.004172	Prasarana laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	3
182	3.25.004173	Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	3
183	3.25.004180	Izin penempatan dan pemanfaatan Rumpon	Rekomendasi	0
184	3.25.004181	Pelabuhan Perikanan	Unit	11
185	3.25.004183	Peralatan dan mesin penunjang pendataan penangkapan ikan terukur	Unit	4
186	3.25.004184	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	6966578327,96
187	3.25.004185	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	436592,13
188	3.25.004186	Unit penangkapan ikan	Unit	0
189	3.25.004187	Kegiatan layanan dan aktifitas kepelabuhanan perikanan	Kegiatan	11
190	3.25.004188	mesin pembuat pakan dan bahan baku pakan	Unit	0

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.26.000006	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)	Lokasi	1
2	3.26.000007	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)	Lokasi	1
3	3.26.000008	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)	Lokasi	1
4	3.26.000009	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)	Lokasi	0
5	3.26.000010	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	6
6	3.26.000011	Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	0
7	3.26.000012	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	0
8	3.26.000018	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	0
9	3.26.000024	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Dalam Negeri	Dokumen	1
10	3.26.000025	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Luar Negeri	Dokumen	1
11	3.26.000028	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Dalam Negeri	Dokumen	1
12	3.26.000029	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Luar Negeri	Dokumen	1
13	3.26.000030	Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	0
14	3.26.000033	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dokumen	1
15	3.26.000034	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	Dokumen	1
16	3.26.000035	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dokumen	0
17	3.26.000042	Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1
18	3.26.000043	Dokumen Perancangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	1
19	3.26.000045	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	0
20	3.26.000047	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	0
21	3.26.000050	Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	1
22	3.26.000053	Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Kawasan	3
23	3.26.000055	Laporan Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	1
24	3.26.000056	Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	0
25	3.26.000058	Laporan Hasil Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 Bidang Pariwisata	Laporan	0
26	3.26.000059	Laporan Hasil Fasilitas Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P3 Bidang Pariwisata	Laporan	0
27	3.26.000064	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	1
28	3.26.000071	Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Pasar Ekspor	Laporan	0

29	3.26.000073	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	0
30	3.26.000078	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	1
31	3.26.000115	Pengunjung objek daya tarik wisata provinsi	Orang	74446231
32	3.26.000118	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Dokumen	0
33	3.26.000121	Retribusi pariwisata yang dikelola provinsi	Rupiah	0
34	3.26.000142	Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Sertifikasi	Unit Usaha	0
35	3.26.000143	Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi	Unit Usaha	200
36	3.26.000148	Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait akademisi bidang pariwisata	Data	0
37	3.26.000149	Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait pelaku usaha dan asosiasi bidang pariwisata	Data	12
38	3.26.000150	Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait komunitas penggiat bidang pariwisata	Data	12
39	3.26.000160	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Dokumen	0
40	3.26.000162	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	0
41	3.26.000163	Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata	Data	0
42	3.26.000165	Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan	Data	0
43	3.26.000166	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Dokumen	0
44	3.26.000168	Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	3
45	3.26.000169	Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf	Dokumen	0
46	3.26.000170	Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata	Dokumen	0
47	3.26.000173	Lokasi pembangunan peningkatan kualitas pada daya tarik wisata unggulan Provinsi yang berbasis alam/budaya/buatan manusia	Lokasi	1
48	3.26.000174	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi	1
49	3.26.000175	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	0
50	3.26.000178	Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	0
51	3.26.000179	Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	0
52	3.26.000180	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	1
53	3.26.000181	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata	Unit	0
54	3.26.000182	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata	Unit	0
55	3.26.000183	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	Unit	0
56	3.26.000184	Kawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan	Kawasan	0
57	3.26.000185	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu	Dokumen	0
58	3.26.000186	Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	50
59	3.26.000192	Data infrastruktur ruang kreatif		0
60	3.26.000194	Data Kondisi SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	0
61	3.26.000195	Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko	Kegiatan Usaha	0
62	3.26.000196	Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor	Laporan	15825
63	3.26.000197	Destinasi Pariwisata Provinsi yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi	0
64	3.26.000198	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	0

65	3.26.000200	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara	Unit	0
66	3.26.000202	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	0
67	3.26.000203	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata Provins	Unit	0
68	3.26.000204	Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan	Dokumen	0
69	3.26.000206	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu	Dokumen	0
70	3.26.000207	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi terpadu	Dokumen	0
71	3.26.000210	Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS)	Dokumen	0
72	3.26.000211	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Orang	0
73	3.26.000213	Data jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang telah dilakukan	Orang	0
74	3.26.000215	Data jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi setelah difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	200
75	3.26.000216	Data kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif yang telah dilakukan	Laporan	150
76	3.26.000219	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Orang	0
77	3.26.000220	Daya jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Orang	0
78	3.26.000223	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Orang	0
79	3.26.000224	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi yang telah dilakukan	Orang	0
80	3.26.000229	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	150
81	3.26.000230	Data kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif yang telah dilaksanakan	Orang	100
82	3.26.000232	Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Orang	400
83	3.26.000233	Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan	Orang	80
84	3.26.000236	Data Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata yang difasilitasi pelatihan	Orang	0
85	3.26.000237	Data kegiatan pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	Orang	0
86	3.26.000238	Data ASN di daerah yang memahami tentang kepariwisataan setelah mengikuti Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan	Orang	0
87	3.26.000239	Jumlah kegiatan Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan yang telah dilaksanakan	Orang	0
88	3.26.000243	Data Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata yang tersertifikasi	Orang	0
89	3.26.000244	Data Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata yang telah dilaksanakan	Orang	0
90	3.26.000245	Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan	Dokumen	0
91	3.26.000246	Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan	Dokumen	0
92	3.26.000247	Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang	180
93	3.26.000248	Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan	Orang	180

94	3.26.000249	Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	80
95	3.26.000250	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	80
96	3.26.000257	Data Pelaku Usaha Ekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	Orang	0
97	3.26.000258	Data ASN di daerah yang telah mengikuti Diklat Teknis Kepariwisata Tingkat Lanjutan	Orang	0
98	3.26.000270	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Lembaga	0
99	3.26.000271	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Promosi	0
100	3.26.000272	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Orang	50
101	3.26.000278	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	0
102	3.26.000279	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Lembaga	0
103	3.26.000280	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen	3
104	3.26.000281	Perencanaan Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0
105	3.26.000282	Penyusunan Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0
106	3.26.000284	Penetapan Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0
107	3.26.000286	Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam Rangka Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	Dokumen	1
108	3.26.000287	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	Badan Usaha	200
109	3.26.000288	Kegiatan / event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	Dokumen	0
110	3.26.000289	Komersialisasi Produk Kekayaan Intelektual	Produk	0
111	3.26.000292	Produk yang Memperoleh Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	Produk	0

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.27.000021	Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	Laporan	2
2	3.27.000156	Pengelolaan SDG Hewan yang Sesuai Sistem Manajemen Mutu	Laporan	1
3	3.27.000222	Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan	Sertifikat	696
4	3.27.000223	Sertifikat Benih Tanaman Pangan yang diterbitkan	Sertifikat	4151
5	3.27.000224	Sertifikat Benih Tanaman Perkebunan yang diterbitkan	Sertifikat	1304
6	3.27.000229	Unit Usaha Produk Hewan yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi nomor kontrol veteriner	Unit	218
7	3.27.000239	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan	Laporan	4
8	3.27.000243	Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar	Ton	2893734
9	3.27.000248	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	1811665
10	3.27.000249	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya	Batang	1811665
11	3.27.000250	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia	Batang	1811665
12	3.27.000257	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia	Ton	187900
13	3.27.000263	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	1000
14	3.27.000270	Jumlah Benih Ternak yang beredar	Dosis	218614
15	3.27.000271	Jumlah benih ternak yang bermutu	Dosis	218614
16	3.27.000272	Jumlah benih ternak yang bersertifikat	Dosis	508371
17	3.27.000273	Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan	Dosis	218614
18	3.27.000274	Jumlah Benih Ternak yang tersedia	Dosis	849273
19	3.27.000276	Jumlah benih/bibit ternak yang diproduksi	Ekor	65
20	3.27.000277	Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia	Ekor	849723
21	3.27.000278	Jumlah Bibit Ternak yang beredar	Ekor	12661
22	3.27.000279	Jumlah bibit ternak yang bermutu	Ekor	26
23	3.27.000280	Jumlah bibit ternak yang bersertifikat	Ekor	65
24	3.27.000282	Jumlah Bibit Ternak yang tersedia	Ekor	125682
25	3.27.000284	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1
26	3.27.000285	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1
27	3.27.000286	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Tanaman Pakan Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1
28	3.27.000287	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Wilayah	35
29	3.27.000294	Jumlah Eksisting Benih/Bibit Ternak yang diproduksi	Laporan	16
30	3.27.000296	Jumlah Eksisting Embung Pertanian	Unit	426
31	3.27.000297	Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian	Unit	564
32	3.27.000300	Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	6
33	3.27.000305	Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi	Laporan	1
34	3.27.000309	Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan	Unit	7
35	3.27.000312	Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya	Unit	4
36	3.27.000318	Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi	Laporan	1
37	3.27.000319	Jumlah Eksisting UPTD BIB	Unit	1
38	3.27.000320	Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak	Unit	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
39	3.27.000322	Jumlah Eksisting Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Unit	23
40	3.27.000326	Jumlah Eksisting Laboratorium Pertanian	Unit	10
41	3.27.000327	Jumlah Eksisting Rumah Potong Hewan	Unit	147
42	3.27.000347	Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	1
43	3.27.000348	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen	Laporan	1
44	3.27.000353	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis	Dokumen	14
45	3.27.000356	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi	Laporan	6
46	3.27.000359	Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola	Meter	12586632,52
47	3.27.000361	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	Unit	189
48	3.27.000376	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	1
49	3.27.000379	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	6
50	3.27.000383	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	250
51	3.27.000384	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	127
52	3.27.000385	Jumlah Ketersediaan Alsintan	Unit	1895154
53	3.27.000402	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kegiatan	4
54	3.27.000406	Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan	Unit	13
55	3.27.000407	Jumlah Korporasi Petani	Unit	19
56	3.27.000410	Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara	Unit	1
57	3.27.000414	Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara	Unit	7
58	3.27.000416	Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar	Laporan	1
59	3.27.000417	Jumlah layanan jasa medik veteriner	Unit	40
60	3.27.000419	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan	Ha	0
61	3.27.000420	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	Ha	36250,63
62	3.27.000422	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi	Ha	0
63	3.27.000423	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi	Ha	28587,80
64	3.27.000424	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura	Ha	264
65	3.27.000425	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani	Ha	55
66	3.27.000426	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan	Ha	0
67	3.27.000427	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani	Ha	0
68	3.27.000428	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Ha	36250,63
69	3.27.000429	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	28587,80
70	3.27.000431	Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang ditetapkan	Ha	104/60
71	3.27.000432	Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola	Ha	104/60
72	3.27.000433	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura	Ha	7120,80
73	3.27.000434	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani	Ha	68518,40
74	3.27.000435	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan	Ha	42140,08
75	3.27.000436	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani	Ha	18503,05

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
76	3.27.000437	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	Ha	50480,01
77	3.27.000438	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	49294,43
78	3.27.000441	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	270
79	3.27.000444	Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar	Dokumen	1
80	3.27.000449	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	40
81	3.27.000452	Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	41
82	3.27.000453	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	12
83	3.27.000455	Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan	1
84	3.27.000462	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	1
85	3.27.000466	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	0
86	3.27.000470	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan	Laporan	25688
87	3.27.000471	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Laporan	19096
88	3.27.000476	Jumlah penggunaan pupuk	Ton	1.340.622.243
89	3.27.000502	Jumlah peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	238
90	3.27.000503	Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit	23
91	3.27.000504	Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain)	Ton	27.937.775.865
92	3.27.000509	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	40
93	3.27.000515	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	Ekor	176998
94	3.27.000519	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara	Unit	7
95	3.27.000529	Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan	Unit	5
96	3.27.000544	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	Produk	45
97	3.27.000547	Jumlah Produksi Benih Ternak	Dosis	508371
98	3.27.000548	Jumlah Produksi Bibit Ternak	Ekor	125371
99	3.27.000549	Jumlah Produksi HPT	Ton	26559676
100	3.27.000554	Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM	Rekomendasi	1065
101	3.27.000555	Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM	Rekomendasi	2163
102	3.27.000558	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan	Dokumen	1
103	3.27.000573	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi	Laporan	1
104	3.27.000583	Jumlah Sebaran Alsintan	Unit	1895154
105	3.27.000585	Jumlah Sebaran pupuk	Ton	151550
106	3.27.000587	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani	Unit	30
107	3.27.000588	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	99
108	3.27.000589	Jumlah Sertifikat Veteriner HPM	Sertifikat	30150
109	3.27.000590	Jumlah SKKH/SKPH HPM	Dokumen	11406
110	3.27.000601	Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi	Laporan	7
111	3.27.000603	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	5
112	3.27.000611	Luas kawasan hortikultura	Ha	155

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
113	3.27.000612	Luas kawasan perkebunan	Ha	578861
114	3.27.000614	Luas kawasan tanaman pangan	Ha	10255255
115	3.27.000624	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Dokumen	1
116	3.27.000625	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen	1
117	3.27.000627	Jumlah unit usaha yang telah dilakukan pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada unit usaha produk hewan	Unit Usaha	9
118	3.27.000628	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	9
119	3.27.000656	Jumlah Sebaran Kondisi Alsintan : (Baik dan Rusak)	Unit	961439
120	3.27.000659	Jumlah Ketersediaan Benih Hortikultura (berbentuk batang, biji maupun umbi)	Ton	1812732
121	3.27.000668	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura (berbentuk batang, biji, maupun umbi) yang terawasi peredarannya	Ton	1812732
122	3.27.000681	Data Pekebun	Pekebun	2749

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.28.000001	Bangunan sipil teknis yang Terbangun, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Unit	0
2	3.28.000002	Data (asal usul, jenis mutu) benih atau bibit yang beredar, laporan kegiatan pengawasan benih atau bibit yang beredar	Kasus	10
3	3.28.000003	Data Luas area ekosistem yang dipulihkan, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Laporan Kegiatan	Ha	3
4	3.28.000004	Data Luas area kawasan hutan, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan	Data	2549,30
5	3.28.000005	Data Luas area mangrove yang dilaksanakan rehabilitasi, Bibit Mangrove yang disiapkan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	150
6	3.28.000007	Data Luas Area Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	6,99
7	3.28.000008	Data Luas hutan area patroli, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan	Data	2549,30
8	3.28.000010	Data Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	819
9	3.28.000011	Data Luas kawasan pembangunan sumber benih, laporan kegiatan pembangunan sumber benih, sarana dan prasarana pendukung pembangunan sumber benih	Ha	6,99
10	3.28.000012	Data Luas kawasan yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial	Ha	0
11	3.28.000013	Data Luas lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	329
12	3.28.000014	desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif, Data Luas Desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	2
13	3.28.000015	Dokumen analisis dalam rangka pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	19
14	3.28.000016	Dokumen data dan informasi mengenai Pemanfaatan Hutan di kawasan HL Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	2
15	3.28.000018	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	1
16	3.28.000019	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	Dokumen	10
17	3.28.000022	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi, Data luas ruang kehutanan	Dokumen	2
18	3.28.000023	Dokumen laporan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, pembinaan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, sosialisasi pengelolaan DAS, kelompok masyarakat yang terakses pemberdayaan	Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
19	3.28.000024	Dokumen laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan, Data sarana prasarana pendukung dalam pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Laporan	1
20	3.28.000025	Dokumen model pengelolaan konservasi berbasis kearifan lokal, Dokumen fungsi dan daya dukung DAS tersusun, Tersusunnya penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Dokumen	0
21	3.28.000026	Dokumen paket rekomendasi atas terpenuhinya hak dan kewajiban pemangku pengelolaan DAS, Dokumen terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS, SK dan Forum DAS yang ditetapkan, monev kegiatan RHL lahan kritis	Dokumen	4
22	3.28.000030	Dokumen perencanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Unit	30
23	3.28.000032	Dokumen permohonan PBPHH Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani, laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultasi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHH kayu skala Kecil dan Menengah	Dokumen	12
24	3.28.000035	Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasan Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	0
25	3.28.000038	Dokumen rencana penanganan kerusakan lahan basah	Kasus	1
26	3.28.000039	Dokumen Rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK, laporan kegiatan fasilitasi rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK, Dokumen pengelolaan tempat ibadah dan wisata religi di kawasan hutan	Dokumen	1
27	3.28.000042	Dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan (RtnRL), Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Dokumen	1
28	3.28.000043	Dokumen rencana, laporan kegiatan	Kasus	1
29	3.28.000044	Dokumen tata kelola pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak, DAS Yang dioptimalkan, Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS/Sub DAS, kabupaten/kota yang menerapkan teknik Konservasi Tanah dan Air secara terintegrasi, Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi	Kasus	1
30	3.28.000045	Kegiatan pemanfaatan Tahura, Masyarakat yang mengikuti kegiatan. Laporan Kegiatan.	Permohonan	75
31	3.28.000046	Kegiatan penanganan kerusakan lahan basah, luas area lahan basah yang tertangani kerusakannya, personil pelaksana penanganan kerusakan lahan basah.	Kasus	0
32	3.28.000047	Kegiatan pencegahan kerusakan hasil hutan, Kegiatan pembatasan kerusakan hasil hutan, Klasifikasi hasil hutan	Kasus	0
33	3.28.000048	Kegiatan Pencegahan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA , luas area kawasan Tahura yang telah ditangani, dokumen hasil kegiatan.	Kegiatan	2549,30
34	3.28.000051	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting, luas wilayah daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting yang telah dikelola, laporan kegiatan.	Kasus	8

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
35	3.28.000052	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura Provinsi, Luas wilayah daerah penyangga yang telah dikelola, dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura.	Kegiatan	2
36	3.28.000053	Kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya, dokumen penetapan koridor hidupan liar	Kasus	0
37	3.28.000054	Kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem karst, luas area ekosistem yang telah terkendali.	Kasus	0
38	3.28.000055	Kelompok tani hutan, Data Luas Perhutanan Sosial dalam satu Provinsi	Kelompok	1000
39	3.28.000056	Kerja sama Tahura, Laporan Kegiatan Kerjasama, Data Luas Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen	4
40	3.28.000057	Laporan inventarisasi tumbuhan dan satwa, Laporan data ground check.	Kasus	1
41	3.28.000058	Laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHHBK skala Kecil dan Menengah, izin PBPHH Bukan Kayu skala kecil dan menengah	Laporan	47
42	3.28.000060	Laporan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Laporan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT	Kasus	0
43	3.28.000061	Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Kasus	2
44	3.28.000062	Laporan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan, sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT	Kasus	1
45	3.28.000063	Masyarakat desa yang berpartisipasi, jenis kegiatan usaha ekonomi produktif, pendamping, kelompok, produk yang dihasilkan.	Kasus	0
46	3.28.000065	Pendamping, kegiatan Penguatan dan Pendampingan masyarakat, kelompok/masyarakat yang didampingi dan diberi Penguatan.	Kasus	8
47	3.28.000066	Penerbitan Perizinan berusaha berbasis risiko kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih, Pengadaan dan Pengedaran bibit, serta Pengadaan dan Pengedaran benih dan bibit dalam Provinsi, laporan Pelayanan Perijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih, kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran bibit serta kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih dan bibit.	Kasus	13
48	3.28.000067	Penyuluh kehutanan, kegiatan, SDM bidang Kehutanan, Modul Peningkatan Kapasitas dan kompetensi bidang kehutanan	penyuluh	90
49	3.28.000068	Personil polisi hutan, kendaraan operasional, senjata Pengamanan, laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSI, kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSI.	Laporan	1
50	3.28.000069	Personil Polisi Hutan, kendaraan, Peralatan Pengamanan, kegiatan Pengawasan.	Personil	8
51	3.28.000073	Sertifikat mutu benih yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu benih	Kasus	11
52	3.28.000074	Sertifikat mutu bibit yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu bibit	Kasus	60

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
53	3.28.000075	Sertifikat sumber benih yang diterbitkan, Sarana dan prasana pendukung sertifikasi sumber benih bibit	Kasus	14
54	3.28.000076	Terbentuknya kelembagaan pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak/ Forum DAS, laporan Fasilitasi Forum DAS	Lembaga	1
55	3.28.000078	Unit konservasi tanah dan air Wilayah DAS untuk pengendalian kerusakan lingkungan dan lahan, izin penerapan teknik konservasi DAS, Bangunan Sipil Teknis, terbagunnya bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully plug di Wilayah DAS	Unit	0
56	3.28.000079	Unit manajemen PBPH HHBK skala Kecil dan menengah beroperasi, laporan kegiatan fasilitasi pendampingan terhadap PBPHH HHBK skala Kecil dan Menengah, Luas pembudidayaan hasil hutan bukan kayu	Unit	2

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.29.000004	Data Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun.	Kegiatan Usaha	0
2	3.29.000005	Data Penjualan Tenaga Listrik;	Dokumen	1
3	3.29.000006	Data Perusahaan Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara yang Berizin;	Perusahaan	0
4	3.29.000008	Data Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Unit	4
5	3.29.000009	Data Eksisting Pembangkit Listrik (EBT dan Fosil)	Unit	100
6	3.29.000010	Data Harga Jual Tenaga Listrik;	Rupiah	31597843823
7	3.29.000011	Data Infrastruktur Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	14742
8	3.29.000012	Data Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Km ²	3621
9	3.29.000013	Data Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Unit Usaha	0
10	3.29.000014	Data Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Zona	0
11	3.29.000015	Data Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Dokumen	0
12	3.29.000016	Data Penyimpangan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kasus	0,00
13	3.29.000020	Data Penyimpangan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Kasus	0,00
14	3.29.000022	Data Penyimpangan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	Kasus	0,00
15	3.29.000023	Data Perusahaan yang Melaksanakan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri	Perusahaan	205
16	3.29.000024	Data Perusahaan yang Memiliki Izin Operasi yang Masih Berlaku	Perusahaan	590
17	3.29.000026	Data Realisasi Anggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1
18	3.29.000027	Data Realisasi Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	14742
19	3.29.000030	Data Rekomendasi Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Rekomendasi	0
20	3.29.000031	Data Rekomendasi Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rekomendasi	0,00
21	3.29.000032	Data Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Rekomendasi	0

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
22	3.29.000033	Data Rumah Tangga Tidak Mampu yang Menerima Manfaat berupa Bantuan Sambungan Listrik	Dokumen	1
23	3.29.000034	Data Rumah Tangga Tidak Mampu	Dokumen	1
24	3.29.000036	Data Sumber Pembangkit Listrik yang direncanakan	Titik	1
25	3.29.000037	Data Target Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	1
26	3.29.000038	Data Wilayah yang Belum Teraliri Listrik	Dokumen	0
27	3.29.000039	Data Zona Konservasi Air Tanah;	Zona	4
28	3.29.000043	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Unit	3628
29	3.29.000141	Jumlah hasil verifikasi dan evaluasi izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah	Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah	386,00
30	3.29.000142	Jumlah izin pengusahaan air tanah atau persetujuan penggunaan air tanah	Dokumen Izin Pengusahaan Air tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah	328,00

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.30.000003	Bahan berbahaya yang telah dilaporkan pengawasan, distribusi, pengemasan dan pelabelan	Bahan Berbahaya	5
2	3.30.000004	Barang Beredar yang diawasi	Barang	30
3	3.30.000005	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor	Barang	6
4	3.30.000006	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Barang	6
5	3.30.000007	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Sub Distributor	Barang	6
6	3.30.000008	Barang yang telah diuji	Barang	2166
7	3.30.000009	Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	0
8	3.30.000011	Distributor yang telah mendapatkan rekomendasi SIUP-MB melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Distributor	12
9	3.30.000012	Dokumen laporan sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi	Dokumen	0
10	3.30.000016	Jasa yang diawasi	Jasa	0
11	3.30.000017	Kalibrasi yang telah diterbitkan sertifikasinya	Kalibrasi	4298
12	3.30.000018	Kegiatan Distribusi yang telah diperiksa	Kegiatan	30
13	3.30.000027	Kegiatan Perdagangan yang diawasi	Kegiatan	11
14	3.30.000028	Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kegiatan	0
15	3.30.000030	Laporan BPSK yang aktif	Laporan	1
16	3.30.000031	Laporan kasus yang ditangani	Laporan	19
17	3.30.000033	Laporan LPKSM yang aktif	Laporan	29
18	3.30.000034	Laporan orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Laporan	0
19	3.30.000035	Laporan Pelaku Usaha Ekspor yang telah Dibina	Laporan	1
20	3.30.000037	Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Laporan	50
21	3.30.000038	Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Laporan	10
22	3.30.000039	Laporan pengaduan konsumen yang ditangani	Laporan	1
23	3.30.000040	Laporan Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang telah berpartisipasi	Laporan	0
24	3.30.000041	Laporan Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Laporan	4
25	3.30.000042	Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Laporan	1
26	3.30.000043	Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Laporan	4
27	3.30.000055	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengawasan Pestisida	Kegiatan	0
28	3.30.000059	Pelaksanaan Operasi Pasar yang Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	5

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
29	3.30.000069	Pelaku Usaha Distribusi Barang yang telah melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distrbusi barang lintas kabupaten/kota	Pelaku Usaha	30
30	3.30.000095	Produk yang telah diterbitkan sertifikasinya	Produk	6520
31	3.30.000100	Pusat Distribusi Provinsi yang telah terlaksana	Unit	0
32	3.30.000105	Surat Keterangan Asal yang telah dilaporkan untuk diterbitkan	SKA	120431

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.31.000005	Hasil pelaksanaan RPIP dan RPIK	Laporan	1
2	3.31.000028	Peninjauan kembali RPIP setiap 5 tahun	Dokumen	0
3	3.31.000035	Rekomendasi teknis atas draft Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Dokumen	4
4	3.31.000040	Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi	Data	13
5	3.31.000044	Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data	33,43
6	3.31.000052	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas	Data	162
7	3.31.000055	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data	11610
8	3.31.000056	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data	11610
9	3.31.000059	Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas	Data	55
10	3.31.000060	Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional	Data	11610
11	3.31.000061	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi	Data	108
12	3.31.000063	Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	3

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025

URUSAN : 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	3.32.000002	Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi	Kepala Keluarga	19
2	3.32.000005	Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan	Kepala Keluarga	19
3	3.32.000006	Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan	Orang	34
4	3.32.000008	Data KK asal dan tujuan	Kepala Keluarga	19
5	3.32.000012	Data KK yg ikut pelatihan	Orang	34
6	3.32.000013	Data KK yg ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	19
7	3.32.000019	Jenis Materi pelatihan	Materi	4
8	3.32.000020	Jenis materi penyuluhan	Materi	1
9	3.32.000027	Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kota	Laporan / Dokumen	21
10	3.32.000030	Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)	Kepala Keluarga	490
11	3.32.000031	Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan	Orang	19
12	3.32.000032	Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan	Kepala Keluarga	18
13	3.32.000033	Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan	Kepala Keluarga	69
14	3.32.000039	Laporan hasil koordinasi kerja sama	Laporan	21
15	3.32.000040	Laporan hasil sinkronisasi kerja sama	Laporan	21
16	3.32.000043	Lokasi penempatan	Lokasi	4
17	3.32.000052	Transmigran yang diberangkatkan	Kepala Keluarga	19
18	3.32.000053	Transmigran yang ditampung	Kepala Keluarga	19
19	3.32.000054	Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan	Kepala Keluarga	19
20	3.32.000055	Transmigran yang mendapatkan pendampingan	Kepala Keluarga	19
21	3.32.000056	transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan	Orang	19
22	3.32.000059	Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	Kepala Keluarga	19

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	4.01.000001	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	2
2	4.01.000002	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	4
3	4.01.000003	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	4
4	4.01.000004	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	8
5	4.01.000005	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	4
6	4.01.000007	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	8
7	4.01.000008	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	6
8	4.01.000009	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	4
9	4.01.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	4
10	4.01.000011	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	4
11	4.01.000012	Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	45
12	4.01.000013	Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	4
13	4.01.000014	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	37
14	4.01.000015	Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	16
15	4.01.000016	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	8
16	4.01.000017	Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	4
17	4.01.000018	Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	800
18	4.01.000019	Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	8
19	4.01.000020	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	8
20	4.01.000021	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	8
21	4.01.000022	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	8
22	4.01.000023	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	8
23	4.01.000024	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	8
24	4.01.000026	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	56
25	4.01.000027	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	507
26	4.01.000028	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	563
27	4.01.000029	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	543
28	4.01.000030	Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	22
29	4.01.000031	Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	60
30	4.01.000032	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	16
31	4.01.000033	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	16

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
32	4.01.000034	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	14
33	4.01.000035	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	8
34	4.01.000036	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	8
35	4.01.000037	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	4
36	4.01.000038	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	4
37	4.01.000040	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	2
38	4.01.000041	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	2
39	4.01.000042	Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	6
40	4.01.000043	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	16
41	4.01.000044	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4
42	4.01.000045	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	4
43	4.01.000046	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2
44	4.01.000047	Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4
45	4.01.000048	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	8
46	4.01.000049	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4
47	4.01.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4
48	4.01.000051	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	24
49	4.01.000052	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	4
50	4.01.000053	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	24
51	4.01.000054	Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	4
52	4.01.000055	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12
53	4.01.000056	Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	2
54	4.01.000140	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	340

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	4.02.000001	Dokumentasi DPRD	Dokumen	5
2	4.02.000002	Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	100
3	4.02.000004	Publikasi DPRD	Dokumen	5
4	4.02.000006	Situs resmi dan saluran publikasi DPRD	Dokumen	5
5	4.02.000007	Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1
6	4.02.000008	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	21
7	4.02.000009	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	15
8	4.02.000010	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	6
9	4.02.000011	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	0
10	4.02.000012	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	100
11	4.02.000013	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1
12	4.02.000014	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1
13	4.02.000015	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1
14	4.02.000016	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	1
15	4.02.000017	Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2
16	4.02.000018	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1
17	4.02.000019	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	48
18	4.02.000020	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	48
19	4.02.000021	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	48
20	4.02.000022	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	48
21	4.02.000023	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	48
22	4.02.000024	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	2
23	4.02.000025	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	21
24	4.02.000026	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1
25	4.02.000027	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	0
26	4.02.000028	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6
27	4.02.000029	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	42
28	4.02.000030	Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8
29	4.02.000031	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12
30	4.02.000032	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1
31	4.02.000033	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	5
32	4.02.000034	Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	250
33	4.02.000035	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1
34	4.02.000036	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	16
35	4.02.000038	Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	0
36	4.02.000039	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	21
37	4.02.000040	Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	14
38	4.02.000041	Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	14

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
39	4.02.000042	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	37
40	4.02.000043	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	47
41	4.02.000044	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12
42	4.02.000045	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	6
43	4.02.000046	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	3
44	4.02.000048	Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun	Dokumen	1
45	4.02.000055	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	6
46	4.02.000063	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 5.01 - PERENCANAAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	5.01.000001	Aparatur yang menangani Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Orang	4
2	5.01.000003	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	51
3	5.01.000004	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2
4	5.01.000006	Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	2
5	5.01.000007	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1
6	5.01.000009	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	2499
7	5.01.000010	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3
8	5.01.000011	Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	2
9	5.01.000012	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	2
10	5.01.000013	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1
11	5.01.000014	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1
12	5.01.000020	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3
13	5.01.000021	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	105
14	5.01.000022	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3
15	5.01.000023	Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	1
16	5.01.000024	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1
17	5.01.000025	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1
18	5.01.000026	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1
19	5.01.000027	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2
20	5.01.000028	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1
21	5.01.000029	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3
22	5.01.000030	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	1
23	5.01.000031	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2
24	5.01.000032	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1
25	5.01.000033	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
26	5.01.000034	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1
27	5.01.000035	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1
28	5.01.000036	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1
29	5.01.000037	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1
30	5.01.000038	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4
31	5.01.000039	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4
32	5.01.000040	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2
33	5.01.000041	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1
34	5.01.000042	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	3
35	5.01.000043	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	4
36	5.01.000044	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	150
37	5.01.000045	Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	150
38	5.01.000046	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	2
39	5.01.000047	Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kali	2
40	5.01.000048	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3
41	5.01.000049	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	1
42	5.01.000050	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	16
43	5.01.000051	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	13
44	5.01.000052	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	13
45	5.01.000053	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	3
46	5.01.000054	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3
47	5.01.000055	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	1
48	5.01.000056	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah	16

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
49	5.01.000057	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	13
50	5.01.000058	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	13
51	5.01.000059	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Perangkat Daerah	3
52	5.01.000060	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	51
53	5.01.000061	Peserta Konsultasi Publik	Orang	450
54	5.01.000063	Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	150

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 5.02 - KEUANGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2
2	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2
3	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2
4	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2
5	5.02.000009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	35
6	5.02.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	0
7	5.02.000013	Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	0
8	5.02.000014	Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	35
9	5.02.000016	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	35
10	5.02.000017	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	35
11	5.02.000018	Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	1
12	5.02.000024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0
13	5.02.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1
14	5.02.000026	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	49
15	5.02.000028	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4
16	5.02.000031	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	43
17	5.02.000034	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	49
18	5.02.000035	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	0
19	5.02.000036	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	0
20	5.02.000038	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	1
21	5.02.000040	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1
22	5.02.000041	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
23	5.02.000044	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1
24	5.02.000045	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1
25	5.02.000047	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	41
26	5.02.000056	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1
27	5.02.000057	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1
28	5.02.000058	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	1
29	5.02.000060	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1
30	5.02.000061	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	0
31	5.02.000064	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	41
32	5.02.000065	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1
33	5.02.000066	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2
34	5.02.000067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	42
35	5.02.000068	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1
36	5.02.000069	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1
37	5.02.000070	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	42
38	5.02.000071	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	3
39	5.02.000072	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	0
40	5.02.000073	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	84
41	5.02.000075	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4
42	5.02.000076	Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4
43	5.02.000077	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4
44	5.02.000078	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	0
45	5.02.000079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4
46	5.02.000080	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	4
47	5.02.000082	Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4
48	5.02.000083	Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	4
49	5.02.000084	Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	4
50	5.02.000085	Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	4
51	5.02.000086	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	4
52	5.02.000087	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4
53	5.02.000088	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	5.03.000003	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1
2	5.03.000006	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	2171
3	5.03.000008	Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1
4	5.03.000010	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	60
5	5.03.000011	Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	16900
6	5.03.000013	Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	360
7	5.03.000014	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	3689
8	5.03.000015	Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	29
9	5.03.000017	Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1
10	5.03.000019	Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	66
11	5.03.000029	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	183
12	5.03.000030	Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	1
13	5.03.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1
14	5.03.000034	ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	290
15	5.03.000035	ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	1600
16	5.03.000037	ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	7947
17	5.03.000038	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1
18	5.03.000070	Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	5.04.000001	Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	3
2	5.04.000002	Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	26
3	5.04.000003	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	51845
4	5.04.000004	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	0
5	5.04.000005	Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen	4
6	5.04.000006	Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	0
7	5.04.000007	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	200
8	5.04.000008	Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	0
9	5.04.000009	Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	0
10	5.04.000010	Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	16
11	5.04.000011	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	0
12	5.04.000012	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen	61
13	5.04.000013	ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	0
14	5.04.000014	ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	0
15	5.04.000015	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	0
16	5.04.000016	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Nilai Akreditasi	0
17	5.04.000017	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan	0
18	5.04.000021	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen	37

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
19	5.04.000022	Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	6
20	5.04.000023	Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Lembaga	0
21	5.04.000024	ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	0
22	5.04.000027	Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	0
23	5.04.000028	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	0
24	5.04.000029	Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	0
25	5.04.000032	ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang	0
26	5.04.000034	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota	Laporan	0

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	5.05.000090	Laporan Kinerja	naskah	1

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	5.07.000001	Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	2
2	5.07.000002	Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	1
3	5.07.000003	Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	16
2	6.01.000002	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1
3	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	1
4	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1
5	6.01.000005	Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	21
6	6.01.000006	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1
7	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4
8	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	23
9	6.01.000010	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1
10	6.01.000011	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1
11	6.01.000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	49
12	6.01.000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	49
13	6.01.000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	29
14	6.01.000015	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	0
15	6.01.000020	Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	12

DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TAHUN 2025
URUSAN : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
1	8.01.000001	Anggota Paskibraka	Orang	35
2	8.01.000002	Calon Paskibraka	Orang	70
3	8.01.000004	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kegiatan	2
4	8.01.000005	Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unit	5
5	8.01.000006	Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka	Orang	5
6	8.01.000007	Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	5
7	8.01.000008	Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	Unit	5
8	8.01.000009	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	5
9	8.01.000010	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	5
10	8.01.000011	Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Unit	5
11	8.01.000012	Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	5
12	8.01.000013	Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	5,00
13	8.01.000014	Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	8,00
14	8.01.000015	Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka	Orang	10,00
15	8.01.000016	Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka	Orang	58
16	8.01.000017	Pamong/Pengasuh	Orang	58
17	8.01.000018	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	Orang	58
18	8.01.000019	Pelatih Paskibraka	Orang	5
19	8.01.000025	Peserta Calon Paskibraka	Orang	70
20	8.01.000027	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Orang	70,00
21	8.01.000028	Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	70
22	8.01.000029	Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	1000
23	8.01.000030	Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	1000
24	8.01.000031	Purnapaskibraka	Orang	35
25	8.01.000032	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	35
26	8.01.000033	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	5
27	8.01.000034	Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi	Orang	10
28	8.01.000035	Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Orang	5
29	8.01.000037	Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka	Unit	4,00
30	8.01.000038	Transportasi pada pembentukan paskibraka	Unit	4,00
31	8.01.000039	Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	4
32	8.01.000040	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1
33	8.01.000041	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1000
34	8.01.000042	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1000

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
35	8.01.000043	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Seiarah Kebangsaan	Laporan	1
36	8.01.000045	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	5
37	8.01.000046	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	1
38	8.01.000047	Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	1
39	8.01.000048	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1
40	8.01.000049	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1
41	8.01.000050	Paskibraka	Orang	35
42	8.01.000051	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1
43	8.01.000052	Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1
44	8.01.000053	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	250
45	8.01.000054	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	150
46	8.01.000055	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1
47	8.01.000057	Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1
48	8.01.000059	Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	500
49	8.01.000061	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1
50	8.01.000062	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1
51	8.01.000063	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	750

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
52	8.01.000064	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	750
53	8.01.000065	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1
54	8.01.000066	Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1
55	8.01.000067	Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1
56	8.01.000068	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	200
57	8.01.000069	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	200
58	8.01.000070	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1
59	8.01.000071	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	1
60	8.01.000072	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1
61	8.01.000073	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1
62	8.01.000075	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	250
63	8.01.000088	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kegiatan	1
64	8.01.000089	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1
65	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	3725
66	8.01.000093	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Nilai
1	2	3	4	5
67	8.01.000094	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1
68	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4

Keterangan:

- 1. Kolom 1: merupakan nomor urut;
- 2. Kolom 2: Kode DSSD yang bersumber dari e-Walidata SIPD RI;
- 3. Kolom 3: Uraian DSSD yang bersumber dari e-Walidata SIPD RI;
- 4. Kolom 4: Satuan DSSD yang bersumber dari e-Walidata SIPD RI;
- 5. Kolom 5: nilai data atau capaian pada tahun data.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001